

RELASI SOSIAL WARGA PENDATANG DAN WARGA LOKAL DI LAMPUNG SELATAN

Buku *Relasi Sosial Warga Pendatang dan Warga Lokal di Lampung Selatan*, mengantarkan pembaca untuk memahami relasi antara suku pendatang dengan penduduk pribumi yakni Suku Bali dan Suku Lampung yang telah hidup berdampingan di Lampung selama 3 (tiga) generasi.

Buku ini membahas secara komprehensif tentang relasi sosial di antara kedua Suku Bali dan Suku Lampung yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor andalan bagi kedua suku tersebut, karena sektor pertanian menjadi sumber penghasilan yang kemudian berpengaruh pada kemakmuran hidup kedua suku tersebut. Memahami relasi sosial di level *grassroot* dengan menggunakan perspektif sosiologi yang ditulis sangat bermanfaat karena menambah wawasan dan pengetahuan tentang relasi keberagaman suku-suku di tanah air, terutama pada suku-suku yang bermata pencaharian pertanian.

Proses dialektika relasi sosial kedua suku pendatang dan suku pribumi menjadi hal yang menarik untuk dibaca baik oleh mahasiswa, kalangan masyarakat, dan para pengambil kebijakan.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
SOSIOLOGI



RELASI SOSIAL WARGA PENDATANG DAN WARGA LOKAL DI LAMPUNG SELATAN

Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
Darmiyati, S.Pd., M.Pd.
Prof. Ustadi, Ph.D.
Masdjuri, M.Si.

RELASI SOSIAL WARGA PENDATANG DAN WARGA LOKAL DI LAMPUNG SELATAN

Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
Darmiyati, S.Pd., M.Pd.

Prof. Ustadi, Ph.D.
Masdjuri, M.Si.

**RELASI SOSIAL
WARGA PENDATANG
DAN WARGA LOKAL
DI LAMPUNG SELATAN**

RELASI SOSIAL WARGA PENDATANG DAN WARGA LOKAL DI LAMPUNG SELATAN

**Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.
Darmiyati, S.Pd., M.Pd.**

**Prof. Ustadhi, Ph.D.
Masdjuri, M.Si.**



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Napsiah, dkk

Relasi Sosial Warga Pendatang dan Warga Lokal di Lampung Selatan/Napsiah, Darmiyati, Ustadi, dan Masdjuri.—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.

xii, 120 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 109

ISBN 978-602-425-958-7

1. Lampung Selatan -- Hubungan antaretnik. I. Judul.
II. Darmiyati. III. Masdjuri.

303.482 598 183 1

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.2338 RAJ

Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si.

Darmiyati, S.Pd., M.Pd.

Prof. Ustadi, Ph.D.

Masdjuri, M.Si.

RELASI SOSIAL WARGA PENDATANG DAN WARGA LOKAL DI LAMPUNG SELATAN

Cetakan ke-1, Juni 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Editor oleh Diah Safitri

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA SAMBUTAN

Ustadi

Guru Besar Fakultas Pertanian

Universitas Gadjah Mada

Relasi sosial antara masyarakat pendatang dan masyarakat pribumi menjadi hal yang penting untuk diketahui karena kedua suku tersebut memiliki identitas masing-masing yang sama-sama tidak ingin kehilangan identitasnya saat kedua suku tersebut hidup berdampingan di wilayah yang sama. Karena itu, upaya mengadaptasikan diri menjadi hal yang penting bagi pendatang dan penduduk pribumi agar terjalin relasi yang harmonis di antara kedua suku tersebut.

Buku ini mengantarkan pembaca untuk memahami relasi antara suku pendatang dengan penduduk pribumi yakni Suku Bali dan Suku Lampung yang telah hidup berdampingan di Lampung selama 3 generasi. Dari segi waktu bukanlah waktu yang singkat bagi Suku Bali untuk mengadaptasikan diri dengan Suku Lampung. Idealnya dengan kurun waktu tersebut Suku Bali telah mengetahui adat istiadat dan nilai yang dijunjung tinggi Suku Lampung, demikian juga sebaliknya, sehingga konflik yang mengatasnamakan nilai di antara kedua suku tersebut dapat diantisipasi. Namun, tampaknya waktu bukan ukuran untuk keberhasilan mengadaptasikan diri bagi kedua suku tersebut, karena terjadi benturan nilai yang menyebabkan konflik.

Buku ini membahas secara komprehensif tentang relasi sosial di antara kedua Suku Bali dan Suku Lampung yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Bahkan sektor pertanian menjadi sektor andalan bagi kedua suku tersebut, karena sektor pertanian menjadi sumber penghasilan yang kemudian berpengaruh pada kemakmuran hidup kedua suku tersebut. Namun, konflik di antara dua suku tersebut bukan karena keberhasilan mereka mengelola sumber daya pertanian, akan tetapi pemahaman tentang nilai budaya Suku Lampung yang kurang dipahami oleh Suku Bali yang kemudian menyebabkan terjadi konflik yang anarkis.

Memahami relasi sosial di level *grassroot* dengan menggunakan perspektif sosiologi yang ditulis oleh Napsiah, Darmiyati, Ustadi, dan Masdjuri ini sangat bermanfaat karena menambah wawasan dan pengetahuan tentang relasi keberagaman suku-suku di tanah air, terutama pada suku-suku yang bermata pencaharian pertanian. Penulis menguraikan secara runtun relasi yang semula terbangun secara harmonis, akan tetapi relasi harmonis tersebut mengalami konflik yang anarkis yang menimbulkan kerugian baik material dan nonmaterial. Namun relasi konflik tersebut dapat diselesaikan sehingga relasi kedua suku yang tersebut kembali harmonis. Proses dialektika relasi sosial kedua suku pendatang dan suku pribumi menjadi hal yang menarik untuk dibaca baik oleh mahasiswa, kalangan masyarakat, dan para pembuat kebijakan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tercurah kepada Illahi Robbi atas karuniaNya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini dan mempublikasikannya dalam bentuk buku. Penulisan ini adalah kerja keras dari banyak pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada tim riset di Lampung, Kepala Desa Agom, seluruh warga Desa Agom, Kepala Desa Balinuraga, Desa Balinuraga dan pihak kepolisian setempat yang telah membantu sehingga proses pengambilan data dapat berjalan dengan lancar.

Tulisan ini adalah upaya belajar untuk mengelaborasi antara teks dan konteks sehingga tulisan ini masih jauh dari sempurna. Sehubungan dengan itu, kritik dan saran yang kondusif sangat diharapkan demi sempurnanya karya ini dan karya-karya besar yang akan datang.

Yogyakarta, Maret 2019

Penulis

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 RELASI SOSIAL DI TATARAN MASYARAKAT	1
A. Pendahuluan	1
B. Sistematika Buku Ini	10
BAB 2 RELASI SOSIAL DALAM TATARAN TEORETIS	13
A. Relasi Sosial Antaretnis	13
B. Harmonisasi Masyarakat Multikultur	17
BAB 3 CARA MEMAHAMI RELASI SOSIAL DI TINGKAT MASYARAKAT	21
A. Rancangan Penelitian	21
B. Data Sekunder	25
C. Metode Analisis Data	25
D. Lokasi Penelitian	26

BAB 4 GAMBARAN UMUM RELASI SOSIAL WARGA DESA AGOM DAN DESA WARGA BALINURAGA DI LAMPUNG SELATAN	27
A. Desa Agom	33
B. Desa Balinuraga	48
BAB 5 DINAMIKA RELASI SOSIAL SUKU BALI DAN SUKU LAMPUNG	59
A. Kerja Sama Suku Lampung dan Suku Bali	59
B. Toleransi Beragama	62
C. Awal Mula Terjadi Relasi Sosial yang Disosiatif	64
BAB 6 RELASI SOSIAL SUKU BALI DAN SUKU LAMPUNG PASCAKONFLIK	77
A. Suku Bali dan Suku Lampung Berdamai	77
B. Relasi Sosial Suku Bali dan Suku Lampung setelah 6 Tahun Konflik	81
BAB 7 DARI RELASI SOSIAL ASOSIATIF, DISOSIATIF MENUJU RELASI ASOSIATIF SUKU LAMPUNG DAN SUKU BALI	93
A. Relasi Sosial Asosiatif Suku Bali dan Suku Lampung	93
B. Relasi Sosial Disosiatif Suku Bali dan Suku Lampung	97
C. Dari Relasi Sosial Suku Lampung dan Suku Bali: Asosiatif, Relasi Disosiatif Menuju Relasi Asosiatif	103
BAB 8 KESIMPULAN	105
DAFTAR PUSTAKA	109
BIODATA PENULIS	117





DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Wawancara dengan Kepala Desa Agom	22
Gambar 3.2	Wawancara dengan Suku Bali dan Suku Lampung	23
Gambar. 3.3	Model Analisis Interaktif	26
Gambar 4.1	Bangunan Rumah Adat Lampung Saibatin	29
Gambar 4.2	Gambar Baju Adat Lampung Saibatin	29
Gambar 4.3	Menara Siger Identitas Lampung	30
Gambar 4.4	Aktivitas Pelelangan Ikan di TPI BOM Kalianda	32
Gambar 4.5	Kantor Desa Agom	35
Gambar 4.6	Masjid di Desa Agom	38
Gambar 4.7	Tradisi Menyambut Bulan Ramadhan di Kalianda	45
Gambar 4.8	Gapura Desa Balinuraga	49
Gambar 4.9	Kantor Desa Balinuraga	51
Gambar 4.10	Banjar Suku Bali	53

Gambar 4.11	Pola Pemukiman Suku Bali	55
Gambar 5.1	Massa Menuju ke Desa Balinuraga	72
Gambar 5.2	Warga Mengungsi di SPN Bandar Lampung	75
Gambar 5.3	Aparat Keamanan sedang Berjaga-jaga di Arena Konflik	76
Gambar 6.1	Pembacaan Kesepakatan Damai	79
Gambar 6.2	Lapangan Desa Agom	81
Gambar 6.3	Rumah Korban Konflik yang Belum di Bangun	83
Gambar 6.4	Upacara Malesti di Pura Ulun Sui Desa Balinuraga	85
Gambar 6.5	Jalan Tol di Depan Desa Agom	90



BAB 1

RELASI SOSIAL DI TATARAN MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Masyarakat multikultur ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi masyarakat multikultur adalah masyarakat yang menekankan pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan suku, ras, agama, dan antargolongan, baik secara individu maupun kelompok (Kymlicka, 2001) dalam berinteraksi, sehingga relasi sosial yang terbangun adalah relasi sosial yang harmonis. Namun, di sisi lain pertentangan-pertentangan akan terjadi karena beragam perbedaan suku, ras, agama, dan antargolongan tidak dikelola dengan baik, sehingga masyarakat multikultur potensial terjadi konflik sosial (Nasikun, 1984).

Sehubungan dengan itu, maka diperlukan upaya untuk mengelola masyarakat multikultur agar perbedaan suku, ras, agama, dan antargolongan bukan alasan untuk berkonflik, namun justru perbedaan itu diupayakan untuk memperkuat relasi sosial seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Bali yang merupakan salah satu daerah yang mengakomodir masyarakat multikultur.

Meskipun masyarakat Bali dikenal dengan masyarakat multikultur, namun tidak terjadi konflik sosial. Masyarakat pendatang dengan suku

dan agama yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan penduduk asli Suku Bali yang sangat kental dengan adat istiadatnya dan agama yang mayoritas yaitu agama Hindu. Namun warga pendatang dan penduduk asli Bali, keduanya hidup berdampingan karena satu sama lain saling menghormati dan menghargai adanya perbedaan.

Penduduk Bali tidak membeda-bedakan penduduk pendatang, sehingga penduduk pendatang merasa minoritas. Bahkan pemerintah daerah Bali memperhatikan kepentingan-kepentingan penduduk pendatang secara prioritas. Terutama dalam hal perizinan mendirikan tempat-tempat ibadah dan melakukan kegiatan praktik sosial keagamaan, serta memberikan keleluasan untuk mendapatkan sumber penghidupan. Sementara kelompok pendatang menghargai adat istiadat dan agama penduduk Bali. Sikap saling menghargai inilah yang menjadikan kedua penduduk tersebut hidup secara berdampingan dengan harmoni.

Namun, tidak jarang juga masyarakat multikultur tersebut berpotensi menyebabkan konflik yang mengatasnamakan konflik antaragama dan konflik antaretnis seperti yang terjadi di belahan nusantara seperti di Ambon dan Sambas. Dampak dari konflik tersebut menimbulkan perpecahan antarsuku, kebencian, pengusiran terhadap suku pendatang bahkan yang lebih tragis lagi menimbulkan kematian. Tidak jarang daerah-daerah yang pernah konflik tersebut menimbulkan konflik susulan karena pihak yang bertikai tidak puas pada penyelesaian konflik. Karena itu, daerah yang pernah bertikai sering kali disebut dengan daerah yang rawan konflik.

Dari uraian tersebut, maka setidaknya terdapat dua relasi sosial yang dihasilkan pada masyarakat multikultur. Pertama adalah relasi sosial yang dalam sosiologi adalah relasi sosial yang sifatnya akomodatif yang ditandai adanya kerja sama antarsesama anggota masyarakat dan saling mengakomodir berbagai perbedaan bahkan memperkecil pertentangan. Karena itu, relasi sosial seperti ini menjadi relasi sosial yang ideal di dalam masyarakat karena masyarakat harmonis.



Di sisi lain, terdapat tipologi relasi sosial yang bersifat disosiatif yang ditandai oleh adanya pertentangan satu sama lain, sulit untuk mencapai mufakat bahkan dalam waktu yang cepat akan terjadi konflik yang bersifat merugikan satu sama lain. Karena itu, tidak jarang kondisi ini tidak diinginkan oleh masyarakat, karena masyarakat berada dalam kondisi tekanan, sehingga menimbulkan dampak trauma yang berkepanjangan karena mengalami kerugian, kerusakan bahkan kematian.

Ulaan, dkk., (2016) mengatakan bahwa masyarakat multikultur adalah masyarakat yang paling sering terjadi konflik karena keberagaman etnis telah memicu terjadinya konflik. Lebih jauh dipaparkan bahwa dalam beberapa dekade telah terjadi konflik yang mengatasnamakan etnis seperti yang terungkap dalam (Kurniawan dan Syani, 2015; Suardi, 2017) konflik antara etnis Bali dan etnis Lampung. Selain itu juga terjadi konflik etnis Sampit pada tahun 2001 dan Senggau Ledo pada tahun 1996. Akibat konflik tersebut adalah pengusiran dan pengungsian warga Madura di Kalimantan. Konflik serupa juga terjadi di Ambon yang mengusir etnis Bugis, Buton dan Makassar. Selain itu juga terjadi konflik antara etnis Jawa yang bertransmigrasi ke Papua. Etnis Jawa dianggap memonopoli sumber daya yang ada di Papua.

Dalam kehidupan yang multikultur kondisi pertentangan seperti itu sering kali terjadi karena masyarakat berasal dari agama, ras, suku, dan ideologi yang berbeda akan membawa karakter masing-masing terlebih lagi mereka harus bermukim di dalam wilayah yang sama, yang potensial akan terjadi benturan-benturan nilai dalam menjalin relasi (Ramdhani, 2018). Terlebih lagi apabila penduduk transmigran yang pemukimannya telah diprogram oleh pemerintah terpisah dengan penduduk lokal maka benturan nilai potensial terjadi (Hafid, 2016; Ramdhani, 2018).

Para transmigran ditempatkan oleh pemerintah di suatu wilayah yang terpisah dengan masyarakat pribumi sehingga penduduk



pendatang belum mengetahui nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pribumi. Meskipun pemerintah memberikan beberapa fasilitas seperti pemenuhan sarana dan prasana bahkan kehidupan di awal-awal bermukim masih ditanggung oleh pemerintah. Namun, Pemerintah tidak mensosialisasikan kultur masyarakat pribumi kepada kelompok masyarakat pendatang, sehingga para transmigran sulit untuk beradaptasi dengan masyarakat pribumi. Karena itu, menurut Nasution (2016), kelompok transmigran meskipun sudah bertahun-tahun tinggal di pemukiman baru, namun mereka tetap memegang teguh adat istiadat di mana tempat mereka berasal, sehingga menyebabkan keterlambatan beradaptasi dengan lingkungan baru.

Dengan demikian, mengacu pada Raharjo dalam Hafid (2016) pertemuan dua etnis atau lebih di daerah pemukiman transmigrasi akan menimbulkan relasi yang positif apabila mereka mampu menciptakan hubungan sosial yang harmonis di tempat baru mereka. Namun, sebaliknya suasana tidak akan harmonis apabila sikap toleransi terhadap perbedaan tidak diterapkan oleh masing-masing etnis yang berbeda karena lambatnya mengadaptasikan diri di lingkungan baru. Keterlambatan beradaptasi ini pada akhirnya berdampak pada relasi sosial yang bersifat disosiatif seperti pertentangan sampai pada konflik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus konflik antaretnis misalnya konflik pada transmigrasi ke daerah-daerah pulau Sumatera, kultur atau kebiasaan yang lama tidak hilang meskipun dia sudah berpuluh-puluh tahun hidup di tempat yang baru (transmigrasi) sehingga sering kali menimbulkan kesulitan dalam hal beradaptasi di lingkungan baru, kesulitan berkomunikasi dengan penduduk lokal bahkan kesulitan untuk membaur dengan penduduk lokal.

Ketidakmampuan untuk beradaptasi di lingkungan baru menimbulkan persoalan dalam menjalin relasi dengan penduduk asal. Penduduk pendatang membawa sifat dasarnya yang sebelumnya tinggal di pemukiman yang sesama suku, namun manakala tinggal di tempat yang baru dengan kultur yang berbeda maka akan menimbulkan



banyak perbedaan sehingga tidak jarang terjadi ketidakpahaman kultur masing-masing, sehingga relasi sosialnya potensial menuju disosiatif atau konflik antara kedua etnis tersebut (Estaben, *et al.*, 2011).

Penelitian tentang relasi sosial pada masyarakat multikultur yang bersifat asosiatif yang kemudian menimbulkan masyarakat hidup harmonis atau hidup rukun meskipun berbeda agama, ras antargolongan seperti dilakukan oleh Ulaan, Herani dan Rahmawati (2016); Mustafa dan Liberty (2017); Prakasita dan Harianto (2017); Hafid (2016); Radhani (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada relasi disosiatif namun mereka dapat hidup harmonis kembali.

Berbeda dengan penelitian di atas yang memfokuskan pada penelitian relasi sosial yang bersifat asosiatif pada masyarakat yang multikultural, ada juga penelitian yang memfokuskan penelitian pada relasi sosial yang disosiatif yang menimbulkan konflik agama (Bates, *et.al.* 2003; Arjomand, 1993; Fox, 2004 b; Fox, 2004 A; Rummel, 1997) konflik antara etnik (Mahendara, 2010; Rahayu, Jayusman, Sodik, 2016; Benjamin, 2017; Kurniawan dan Sani, 2015; Sadowski, 1998, Humaedi, 2014), bahkan konflik kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu (Nuhaqim dan Andiansah, 2011; Estaben dan Rey, 2011; Davies 1962; Besancon, 2005; Nagel, 1974). Sintesis dari penelitian ini menunjukkan konflik pada masyarakat multikultur disebabkan oleh interaksi dan komunikasi yang kurang memadai sehingga terjadi pertentangan antara etnis yang berbeda.

Bila ditelusuri relasi sosial disosiatif yang menyebabkan terjadi konflik tersebut bermula dari pertentangan sederhana, sehingga tidak tampak ke permukaan atau dalam bahasa sosiologisnya konflik laten, sehingga kesederhanaan relasi tersebut sering kali tidak diselesaikan dengan baik atau bahkan dianggap tidak ada pertentangan, karena dianggap bukan hal penting untuk dicarikan solusinya. Karena itu, semakin lama pertentangan itu memuncak maka relasi sosial yang



semula harmonis berubah menjadi relasi sosial konflik yang anarkis (Cosser and Foz, 2002; Russett, Oneal and Cox, 2002).

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa etnis pendatang dengan etnis pribumi sering kali konflik karena berbeda etnis yang satu sama lain menimbulkan berbagai prasangka yang negatif, karena dianggap etnis pendatang kurang mampu beradaptasi dengan penduduk lokal, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Karena itu pertentangan-pertentangan bahkan akan terjadi konflik yang berkepanjangan, terutama apabila pertentangan tersebut tidak dicari akar permasalahannya dan tidak diselesaikan secara tuntas (Devito, 1979).

Tidak semua masyarakat yang multikultur akan terjadi konflik, ada beberapa kasus di Indonesia masyarakat yang dapat hidup berdampingan secara harmonis, meskipun potensi konflik tidak dapat diredam. Kemampuan untuk beradaptasi dari penduduk pendatang dan penduduk pribumi yang menyebabkan mereka dapat hidup secara harmonis (Hafid, 2016; Prakasita dan Harianto, 2017). Meskipun terjadi konflik mereka dapat hidup dengan harmonis kembali, seperti yang terjadi di Lampung. Dalam konteks ini peran banyak faktor pendukung selain ada kesadaran dari kedua suku untuk hidup harmonis dengan cara saling menghormati dan menghargai juga terdapat lembaga-lembaga lokal yang turut berkontribusi dalam mengembalikan relasi sosial yang mengalami pergeseran, seperti konflik yang terjadi di Lampung Selatan. Selain itu, faktor eksternal berupa pembangunan infrastruktur yang ada di sekitar tempat tinggal turut berkontribusi dalam penyelesaian konflik karena aktivitas ekonomi warga semakin bertambah.

Sehubungan dengan itu, relasi sosial masyarakat multikultur di Lampung Selatan ini perlu diteliti, mengingat bahwa apabila relasi sosial yang semula harmonis namun setelah terjadi konflik maka akan terjadi konflik baru. Selain itu sering setelah konflik selesai biasanya relasi sosial di antara keduanya tidak terjalin secara harmonis karena



satu sama lain saling menyimpan rasa dendam. Hal disebabkan karena penyelesaian konflik tidak sampai pada akar permasalahan. Selain itu juga salah satu suku tidak ada kesadaran untuk saling berdamai, sehingga akhirnya berpengaruh pada relasi sosial.

Kajian seperti ini penting untuk dikaji mengingat bahwa setiap masyarakat memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan relasi sosial yang sedang konflik sehingga relasi sosial di Lampung Selatan ini bisa dijadikan model untuk relasi sosial yang masyarakatnya multikultur.

Relasi sosial pada masyarakat multikultural di Lampung Selatan sudah lama terjalin. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang bermukim di Lampung Selatan bukan hanya masyarakat lokal yakni suku Lampung saja, melainkan Semendo (Sumatera Selatan), Bali, Lombok, Jawa, Minang, Batak, Sunda, Madura, Bugis, Banten, Palembang, Aceh, Makasaar, warga keturunan, Arab, Tionghoa. Apabila mengacu pada Pusat Statistik (BPS, 2015) Provinsi Lampung tahun 2010 dari total 7.608.405 jiwa penduduk Lampung terdiri atas 63,84% etnis Jawa. Sedangkan etnis Lampung lebih rendah dibandingkan etnis Jawa yaitu 13,51%. Sebanyak 9,58% etnis Sunda, 2,27% etnis Banten, 5,47% etnis asal Sumatera Selatan, 1,38% Bali, 0,92% etnis Minangkabau sebanyak 0,53%. Sementara etnis Cina, 0,28%. Etnis Bugis 0,69%. Sementara 1,21% adalah etnis Batak, Aceh, Jambi, Sumatera lainnya, Betawi, Papua, NTB, NTT, dan Kalimantan.

Kedatangan masyarakat dari luar Pulau Jawa ke Lampung Selatan karena letak wilayah Lampung Selatan yang strategis yakni menghubungkan Pulau Jawa, Madura, dan Bali dengan Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak Bakuheni. Selain itu, potensi sumber daya alam yang kaya yang bersumber dari maritim dan pertanian menjadi fokus perhatian para pendatang untuk berupaya bermukim di daerah Lampung Selatan. Terlebih lagi penduduk Lampung Selatan yang memiliki sikap menghargai sesama manusia, ramah, dan memiliki karakter yang sangat kooperatif dalam perbedaan serta terbuka dalam



perubahan, semua itu merupakan daya tarik utama bagi para pendatang untuk dapat bermukim di daerah Lampung Selatan.

Suku Bali adalah salah satu suku pendatang di daerah Lampung Selatan. Utami (2013), melaporkan bahwa Suku Bali yang ada di Lampung adalah program pemerintah yang dimulai sejak tahun 1952. Saat itu pemerintah membagi ke dalam dua program yaitu periode pertama yaitu dilakukan tahun 1952 memindahkan Suku Bali yang berada di Kabupaten Tabanan, Karang Asem, dan Klungkung yang menempati wilayah Seputih Raman di Lampung Tengah. Pada tahun 1963 saat itu Gunung Api Agung meletus, maka Suku Bali kembali transmigrasi ke Lampung Selatan dengan menempati wilayah Balinuraga.

Suku Bali yang direlokasi pemerintah yang merupakan korban letusan Gunung Agung sampai saat ini bermukim di Desa Balinuraga. Mereka bermukim secara berkelompok letakan desa tersebut tidak berjauhan dengan perkampungan Suku Lampung. Mereka diberi lahan kosong oleh pemerintah untuk daerah pemukiman dan lahan pertanian. Dari lahan itulah mereka hidup sebagai petani yang memiliki etos kerja yang tinggi.

Selaku warga pendatang, proses adaptasi dilakukan meskipun belum sepenuhnya Suku Bali berhasil membaaur dengan suku Lampung, namun setidaknya mereka menjalin relasi sosial yang harmonis dengan tidak ada pertentangan di antara kedua suku tersebut. Terlebih lagi pada saat itu, Suku Bali masih dalam tahap mencari sumber mata pencaharian sehingga waktu mereka tercurah di dalam aktivitas ekonomi pertanian yang merupakan daerah baru bagi mereka. Kondisi ini mendukung harmonisnya relasi sosial mereka karena minimnya interaksi dan komunikasi pada masyarakat Lampung.

Kerja keras dan ketekunan dalam mengelola lahan pertanian, telah mengantarkan kehidupan Suku Bali memiliki penghasilan yang tetap, sehingga berpengaruh pada kesejahteraan hidup yang semakin meningkat dengan memiliki fasilitas seperti motor, mobil,



dan juga *smartphone* yang semuanya itu mendukung gaya hidup Suku Bali khususnya remaja Bali. Dengan adanya kemakmuran tersebut pergaulan remaja Bali semakin luas, tidak saja di sekitar kampung tempat mereka tinggal akan tetapi sampai di pusat kota Provinsi Lampung.

Tampaknya kemajuan ekonomi Suku Bali tidak berbanding lurus dengan kuatnya moralitas remaja Bali. Nilai-nilai Bali telah lama ditinggalkan, sedangkan nilai-nilai Suku Lampung belum tersosialisasi dan terinternalisasi sehingga relasi sosial antara kedua suku tersebut sering kali mengalami relasi sosial yang disosiatif atau mengacu pada Durkhiem dalam Ritzer dan Goodman (2012) masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang mengalami *anomie*. Puncaknya adalah kasus pada pergaulan muda-mudi remaja Bali dan Lampung yang menyebabkan konflik besar-besaran yang mengakibatkan tewasnya 14 orang dan kerugian yang diperkirakan mencapai 2 miliar. Menurut Kurniawan dan Syani (2012) konflik ini adalah konflik antaretnis yang terbesar di Indonesia selain kasus konflik di Sampit pada tahun 2001. Meskipun konflik ini tergolong konflik yang besar, namun tidak ada pengusiran terhadap Suku Bali dan yang lebih menarik lagi pascakonflik selama 6 tahun ini tidak ada gejala-gejala susulan terjadinya konflik baru, bahkan kedua suku tersebut hidup berdampingan secara harmonis dan menjalin kerja sama di bidang sosial ekonomi untuk mempererat solidaritas kedua suku tersebut, sehingga solidaritas Suku Lampung dan Suku Bali menguat setelah terjadi konflik.

Dari uraian di atas rumusan masalah yang diajukan adalah: bagaimana relasi sosial Suku Bali dan Suku Lampung sebelum dan setelah terjadi konflik?

Penelitian tentang relasi sosial antaretnis di Lampung Selatan ini bertujuan untuk mengetahui relasi sosial Suku Bali selaku suku pendatang Suku Lampung yang merupakan penduduk lokal. Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya kajian sosiologi yang menitikberatkan pada kajian tentang



relasi sosial di dalam masyarakat. Selain itu penelitian ini akan menjadi kebijakan untuk model relasi sosial yang masyarakatnya mengalami relasi sosial disosiatif.

B. Sistematika Buku Ini

Setelah bagian pendahuluan yang isinya memfokuskan pada relasi sosial antarsuku pendatang (Suku Bali) dan warga lokal (Suku Lampung) serta pentingnya mengapa kajian ini penting dilakukan, maka untuk mencapai tujuan yakni ingin mengetahui relasi sosial kedua suku tersebut baik sebelum terjadi konflik tahun 2012 dan setelah terjadi konflik, maka untuk membangun proposisi dalam penelitian ini dibahas dalam bab 2.

Relasi sosial dalam tataran teoretis dibahas dalam bab 2. Bab ini meninjau teori-teori yang terkait dengan relasi sosial, yang berfungsi untuk kerangka kerja secara teoretis sebelum turun ke lapangan. Kemudian bab 3 membahas tentang cara untuk menggali data tentang relasi sosial di daerah pascakonflik tepatnya di Desa Balinurgara dan Desa Agom. Beragam cara dilakukan sehingga data yang dibutuhkan untuk penulisan buku ini diperoleh. Bab 4 membahas tentang potensi sosial ekonomi dan budaya pada kedua Suku Lampung dan Suku Bali. Dalam bab ini dirinci tentang nilai yang dijunjung tinggi oleh kedua suku tersebut.

Relasi sosial antara Suku Bali dan Suku Lampung baik sebelum terjadi konflik dan setelah terjadi konflik. Relasi sosial yang asosiatif relasi sosial yang disosiatif dan juga relasi sosial yang kembali ke relasi sosial asosiatif dibahas dalam bab 5. Bab 6 menguraikan relasi sosial pascakonflik. Bab ini menguraikan beberapa perubahan sosial setelah terjadi konflik baik tentang relasi sosial keduanya dan juga perubahan fisik seperti dibangunnya Jalan Tol Sumatera yang juga mendorong warga menjalin relasi asosiatif.



Elaborasi antara teks dan konteks yakni teori relasi sosial dan relasi Suku Lampung dan Suku Bali menjadi fokus tujuan dalam bab 7. Di bab ini juga sekaligus menganalisis tentang teori-teori yang digunakan yang didukung dengan kajian terdahulu. Pada bab 8 buku ini merupakan kesimpulan relasi sosial warga pendatang dan warga lokal mengalami dinamika, meskipun semula asosiatif namun di tengah perjalanannya mengalami disosiatif yang menyebabkan konflik lalu relasi sosial tersebut secara perlahan mengalami hamonis kembali. Temuan ini sekaligus menyatakan bahwa teori yang digunakan mengalami perkembangan pada konteksnya di Suku Agom dan Suku Bali.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 2

RELASI SOSIAL DALAM TATARAN TEORETIS

Dalam rangka menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini maka kerangka kerja teoretis yang digunakan relasi sosial masyarakat kemudian diperkuat oleh konsep-konsep teori konflik, sehingga pemahaman tentang relasi sosial sosial baik yang asosiatif dan disosiatif pada masyarakat multikultur akan komprehensif.

A. Relasi Sosial Antaretnis

Relasi sosial yang terbuka berdampak pada masyarakat yang multikultur yang berasal dari etnis yang berbeda. Menurut Rustanto (2015) kemunculan etnisitas adalah kelompok tersebut setidaknya telah menjalin hubungan, kontak dengan kelompok etnis yang lain dan masing-masing menerima gagasan serta ide-ide perbedaan di antara mereka, baik secara kultural maupun politik. Etnisitas kerangka hubungan relasional, dalam interaksinya dengan dunia luar dan komunitas kelompoknya.

Lebih lanjut Rustanto (2015) mengemukakan setidaknya ada tiga perspektif untuk melihat etnisitas yaitu teori primordial, teori

situasional, dan teori relasional. Teori situasional memandang bahwa kelompok etnis adalah etnis yang dibangun atas dasar kesamaan para warganya, bagi mereka yang lebih penting bukan wujud kesamaan itu sendiri melainkan perihal penentuan dan pemeriharaan batas-batas etnis yang diyakni bersifat dan merupakan jawaban atas kondisi sosial historis terhenti. Sedangkan teori situasional, etnik merupakan hasil dari adanya pengaruh yang berasal dari luar kelompok. Salah satu faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap etnisitas adalah kolonialisme yang demi kepentingan administratif pemerintah kolonial telah mengkotak-kotakkan warga jajahan dalam kelompok-kelompok etnik dan ras. Sementara teori relasional mendasarkan pada pandangan bahwa kelompok etnik merupakan penggabungan yang telah dibandingkan dalam menentukan pembentukan etnik dan perbedaan yang telah dibandingkan dalam menentukan pembentukan etnik dan pemeliharaan batas-batasnya.

Lebih lanjut Rustanto juga mengemukakan bahwa dampak dari primordial adalah menghambat hubungan antarbangsa, menghambat proses asimilasi dan integrasi dan mengakibatkan terjadinya diskriminasi seperti perbedaan dengan sengaja terhadap golongan tertentu yang didasarkan pada ras agama, mayoritas, dan minoritas masyarakat. Selain itu dampak primordial adalah menyebabkan terjadi konflik yang anarkis. Selain dampak negatif, dikemukakan juga dampak positif dari primordial adalah menumbuhkan cinta tanah air, mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa, mempertinggi semangat patriotisme, dan menjaga keutuhan dan kestabilan budaya.

Relasi sosial merupakan hasil dari interaksi yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antarindividu yang satu dengan individu yang lain dan saling memengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial jika tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. Dikatakan sistematis karena terjadinya secara teratur dan berulang kali dengan pola yang sama. Menurut



Spradley dan McCurdy dalam Ramadhan (2009), relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial.

Dalam kehidupan bersama, antarindividu satu dengan individu lainnya terjadi hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan itu individu ingin menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginannya masing-masing. Untuk mencapai keinginan tersebut biasanya diwujudkan dengan tindakan melalui hubungan timbal balik, hubungan inilah yang disebut dengan interaksi. Menurut Setiadi dan Usman (2011) interaksi sosial merupakan bentuk yang tampak apabila orang saling mengadakan hubungan, baik secara individu maupun secara kelompok.

Proses interaksi akan diikuti oleh komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila interaksi itu dilakukan secara langsung melalui *face to face* maka arah komunikasi itu terlihat secara langsung, melalui ekspresi wajah. Komunikasi yang dijalin secara langsung akan meminimalisir kesalahan persepsi karena langsung bisa dilihat dari ekspresinya. Inilah keuntungan orang-orang yang melakukan interaksi dan berkomunikasi secara langsung sehingga potensi kesalahan dalam komunikasi dapat diantisipasi. Lebih lanjut Setiadi dan Usman (2011) mengemukakan bahwa dampak dari interaksi sosial tersebut dapat menyebabkan interaksi asosiatif dan disosiatif.

1. Relasi Sosial Asosiatif pada Masyarakat Multietnis

Dalam menjalin hubungan relasi sosial di dalam masyarakat maka akan terpola relasi sosial yang asosiatif. Relasi sosial ini adalah proses hubungan yang berbentuk kerja sama karena saling mengerti satu sama lain. Saling memahami tujuan dan keinginan masing-masing. Dengan demikian, maka relasi sosial yang asosiatif ini akan menimbulkan hubungan yang harmonis, sekalipun berbeda dari agama, suku, ras dan antargolongan. Harmonisasi kehidupan ini, yang dianggap oleh



masyarakat adalah relasi sosial yang ideal karena mampu mengelola perbedaan yang ada.

Pada tataran relasi sosial yang asosiatif maka masing-masing pihak melakukan toleransi terhadap perbedaan, sehingga kerja sama, asimilasi bahkan akulturasi menjadi satu kesatuan di dalam relasi sosial masyarakat kultural.

2. Relasi Sosial yang Disosiatif pada Masyarakat Multikultur

Relasi sosial yang disosiatif akan melahirkan relasi sosial yang bertentangan di dalam masyarakat. Pertentangan tersebut disebabkan berbagai hal bukan saja karena ekonomi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, politik yang merupakan kekuasaan dan juga sosial yang menjadi identitas seseorang. Pertentangan berasal dari interaksi sehari-hari orang yang cenderung tidak bermasalah awalnya karena dianggap tidak mengganggu. Namun, sekecil apa pun gangguan apabila tidak diselesaikan, maka potensial terjadi konflik.

Konflik diartikan juga sebagai suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan sebagai bentuk konfrontasi fisik antara beberapa pihak dan berkembang dengan adanya ketidaksepakatan karena ada perbedaan kepentingan baik kepentingan (Pruit, 2011). Kemudian Saifuddin (1986), menjelaskan bahwa konflik adalah mekanisme yang mendorong terjadinya perubahan di mana hubungan antarkonflik dan perubahan cenderung merupakan satu proses yang berlangsung dengan semestinya secara terus-menerus. Hal tersebut dipertegas oleh Dahrendorf (*dalam* Laurer, 1993) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan.

Perubahan-perubahan yang disebabkan karena konflik dapat terjadi dengan cepat, sehingga tidak terencana dengan baik. Dengan demikian, sebagian masyarakat tidak siap menerima perubahan tersebut. Itulah sebabnya karena perubahan yang tidak terencana tersebut menyebabkan masyarakat trauma yang berkepanjangan



karena beberapa harta benda dan sumber mata pencaharian mereka hilang, bahkan kematian. Dengan demikian, masyarakat yang mengalami perubahan dengan cepat seperti itu akan menimbulkan berbagai dampak seperti tingkat kemiskinan meningkat, tingkat kebergantungan hidup pada pihak-pihak lain, dan juga secara psikologi akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan.

Namun, di balik terjadinya konflik bukan saja kerugian, kerusakan dan kematian saja, tetapi juga konflik dapat menyebabkan solidaritas semakin kuat. Hal ini disebabkan karena mereka disatukan oleh rasa yang sama yaitu sama-sama menjadi korban konflik yang menanggung berbagai kerugian. Selain itu, setelah terjadi konflik maka berbagai lembaga sosial lokal akan berfungsi bahkan saat sebelum terjadi konflik tidak ada lembaga-lembaga lokal karena masyarakat tidak membutuhkannya. Namun setelah konflik maka warga mendirikan lembaga lokal. Menurut Musthofa dan Liberty (2018), lembaga lokal ini berfungsi sebagai wadah untuk menjalin komunikasi di antara kedua suku yang bertikai sehingga kehidupan mereka akan terjalin erat. Sedangkan Wijono (2012), mengatakan bahwa dampak positif konflik adalah membawa masalah yang diabaikan sebelumnya secara terbuka, mendorong ide baru, memfasilitasi perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik.

B. Harmonisasi Masyarakat Multikultur

Definisi tentang masyarakat multikultur sangat beragam, hal ini menjadi bukti bahwa ketertarikan pada isu ini menjadi fokus perhatian para ilmuwan dalam beberapa dekade. Beberapa ahli mendefinisikan masyarakat multikultur adalah sebagai berikut:

Masyarakat multikultur adalah masyarakat yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras antargolongan. Multikultural berakar pada paham multikulturalisme yang menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas beragam budaya yang terlihat dari interaksi (Lewellen, 2003; Hadif, 2016).



Sedangkan menurut Suparlan (2002), akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedomanan bagi kehidupan manusia. Akhyar (2015), mengatakan bahwa multikultural pada dasarnya mampu menerima perbedaan budaya, ras, agama, dan bahasa serta bisa hidup berdampingan tanpa merugikan kehidupan masyarakat.

Senada Sunardi (2017), bahwa masyarakat multikultur adalah masyarakat yang terdiri dari beragam adat istiadat, agama, bahasa dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Karena itu masyarakat multikultur menerima perbedaan-perbedaan tersebut dan menjunjung tinggi kesetaraan dalam menjalankan kehidupan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Rustanto (2015), Masyarakat multikultur adalah suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen, baik suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, dan bahasa yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu pemerintahan tetapi dalam masyarakat itu masing-masing terdapat segmen-segmen yang tidak bisa disatukan. Nasikun (1984) menyatakan bahwa masyarakat multikultur adalah suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktur memiliki sub-subkebudayaan yang bersifat *diverse* yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari satu kesatuan sosial, serta seringnya muncul konflik-konflik sosial.

Suardi (2017), memberikan gagasan bahwa untuk mengantisipasi konflik pada masyarakat multikultur adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama. Karena itu, fokus multikulturalisme terletak pada pemahaman akan hidup penuh dengan perbedaan sosial budaya, baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat multikultur merupakan kekuatan karena adanya perbedaan justru



memperkaya potensi-potensi daerah. Selain itu adanya perbedaan dari berbagai kultur akan menimbulkan etos kerja yang tinggi, seperti keberhasilan ekonomi dari warga pendatang akan memotivasi warga asal untuk lebih giat lagi bekerja. Selain itu, adanya perbedaan potensial menimbulkan pertentangan, sehingga akan muncul perubahan yang cepat di dalam masyarakat multikultur tersebut.

Namun, interaksi yang terjalin di dalam masyarakat multikultur sering kali menimbulkan pertentangan bahkan akan menimbulkan konflik yang berujung pada kerugian dan kematian. Yang menjadi persoalan adalah setelah bertahun-tahun relasi sosial itu terjalin karena ada pertentangan maka kondisi masyarakat akan rusak solidaritasnya. Padahal tempat tersebut merupakan tempat tinggal mereka yang tidak saja tempat tinggal tetapi juga tempat aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, ada upaya masyarakat untuk menjalin kembali relasi yang sudah rusak tersebut agar dapat hidup secara harmonis seperti terungkap dalam penelitian Bumulo (2013) mengatakan bahwa masyarakat yang heterogen sering kali terjadi disintegrasi sosial. Namun, konflik tersebut dapat diredam, sehingga kehidupan masyarakat damai. Demikian halnya kasus konflik di Sambas, menurut Hendri, dkk., (2013) setelah terjadi konflik warga hidup berdampingan kembali dengan damai dan saling bekerja sama dengan baik.

Harmonisasi kehidupan kembali terjadi karena ada relasi yang bersifat positif atau asosiatif antarwarga, di mana satu sama lain warga saling menjalin interaksi sehingga meskipun terjadi konflik karena terjalin interaksi yang terus-menerus maka warga yang bertikai hidup dengan harmonis (Hafid, 2016). Selain itu adanya upaya untuk kembali harmonis maka diperlukan upaya untuk kembali memperbaiki tatanan kehidupan yang sudah pernah terjadi pertentangan. Upaya tersebut datang dari dua belah pihak dan dari kesadaran masing-masing (Ramdhani, 2018).



Setidaknya ada beberapa cara untuk menyatukan relasi masyarakat yang pernah terjadi konflik dan kembali kehidupan yang damai kembali adalah adanya tindakan kolektif sosial keagamaan. Kegiatan gotong royong misalnya, adalah tindakan yang kolektif yang dilakukan oleh warga yang telah terlembaga. Dengan kegiatan gotong royong seperti kegiatan gotong royong bersih desa atau kegiatan gotong royong membangun pos ronda menjadi media masyarakat untuk bersatu dalam segala perbedaan (Prakasita dan Harianto, 2017). Selain itu, ada juga tindakan warga dengan cara menghadiri berbagai kegiatan praktik-praktik lintas agama untuk memperkuat relasi sosial.

Mustofa dan Liberty (2018), menyatakan bahwa kehidupan masyarakat yang multikultur dapat berjalan harmonis kembali dengan cara memanfaatkan peran lembaga yang ada dibentuk oleh suku-suku yang berkonflik. Peran lembaga ini berfungsi untuk menyatukan mereka dalam suatu wadah sehingga suku yang bertikai tersebut memiliki satu tujuan yaitu menuju kehidupan yang harmonis. Dalam konteks ini toleransi terhadap perbedaan baik agama, suku, dan juga pendapat menjadi poin utama yang dilakukan untuk membangun harmoni, menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang multikultur.

Dengan demikian, bahwa kehidupan yang multikultur semula memiliki relasi asosiatif karena satu warga dengan warga lain masih dalam tahap adaptasi. Namun seiring dengan perubahan ekonomi dan sosial budaya maka potensial relasi sosial yang asosiatif tersebut potensial mengalami relasi sosial yang diasosiatif. Karena itu, kondisi relasi sosial tersebut mengalami perpecahan dan merugikan kehidupan warga. Sehubungan dengan itu, maka berbagai upaya cara dilakukan untuk memperbaiki kondisi relasi sosial tersebut, sehingga pada akhirnya membentuk relasi sosial yang asosiatif.





BAB 3

CARA MEMAHAMI RELASI SOSIAL DI TINGKAT MASYARAKAT

A. Rancangan Penelitian

Penelitian tentang relasi sosial suku Lampung dan suku Bali di Lampung Selatan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mengungkap relasi sosial kedua suku tersebut, pola kerja sama, konflik yang terjadi dan upaya untuk menjalin relasi pascakonflik serta perubahan-perubahan yang terjadi setelah konflik.

1. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, informasi dari informan merupakan data utama yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis relasi sosial suku Lampung dan suku Bali. Penentuan informan dilakukan berdasarkan *purposeful sampling method* (metode sampling bertujuan) dengan memilih orang yang dinilai mengetahui, terlibat, dan menguasai informasi yang berkaitan dengan topik dan masalah penelitian (Patton, 2009). Dengan demikian, informan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian ini. Oleh sebab itu, informan tersebut dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

- (1) Para pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan masyarakat sehingga memiliki informasi tentang relasi sosial kedua suku tersebut. Informan yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah (1) Bupati Lampung Selatan (2) Camat Kalianda; (3) Kepala Desa Agom; (4) Kepala Desa Balinuraga;
- (2) Tokoh-tokoh informal seperti: tokoh agama, tokoh pemuda, para tetua desa, tokoh adat Lampung;
- (3) Para pihak yang terlibat dalam konflik

Berdasarkan 3 (tiga) kelompok informan di atas, pemilihan informan dilakukan dengan cara *snowball sampling* (Groenewald, 2004), dengan cara pertama kali mendatangi Camat Kalianda untuk mengetahui informasi terkait dengan konflik yang terjadi tahun 2012. Dari wawancara dengan camat peneliti mendapat rekomendasi untuk menghubungi kepala desa Balinuraga dan Kepala Desa Agom (Gambar 3.1). Setelah berbincang-bincang sejenak, peneliti direkomendasikan kepada warga baik yang menjadi korban maupun tidak (Gambar 3.2). Dari sinilah peneliti mendapat berbagai informasi terkait dengan daerah karakter-karakter masyarakat yang diteliti.



Gambar 3.1 Wawancara dengan Kepala Desa Agom



Gambar 3.2 Wawancara dengan Suku Bali dan Suku Lampung



Seluruh hasil wawancara, baik berupa rekaman dan catatan lapangan yang diperoleh hari itu, langsung dibuatkan transkrip, setelah peneliti pulang dari lokasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan data karena data yang digali sangat beragam. Selain itu, agar segera diketahui hasil data yang diperoleh dalam bentuk rapi.

Untuk memperoleh data yang valid, proses triangulasi dilakukan dengan cara mewawancarai informan lain dengan menggunakan instrumen wawancara yang sama, sehingga seluruh data yang terkumpul benar-benar valid. Selain itu proses triangulasi metode juga dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi atau sebaliknya sehingga peneliti memperoleh data yang valid. Dengan demikian, seluruh data yang disajikan dalam penelitian ini telah dikonfirmasi dengan sumber informasi. Peneliti melakukan konfirmasi data tidak hanya pada saat turun lapangan (*face to face*) tetapi juga melalui telepon manakala peneliti telah meninggalkan lokasi penelitian.

2. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara partisipan dan nonpartisipan. Tujuan dilakukan teknik observasi partisipan untuk menggali data yang tidak dapat diungkap pada saat wawancara. Untuk memperdalam data maka peneliti tinggal dengan mereka selama satu hari satu malam dalam seminggu selama empat bulan.

Data yang diambil melalui observasi tidak langsung adalah pemukiman, pola-pola pemukiman, kondisi rumah, sarana dan prasarana, sistem perekonomian warga, luas lahan, status kepemilikan lahan pertanian, perubahan secara fisik dan nonfisik di kedua desa, sistem nilai yang dianut dan juga praktik-praktik sosial keagamaan. Sedangkan partisipasi langsung dilakukan untuk mencari informasi tentang relasi sosial kedua suku tersebut setelah terjadi konflik. Data yang diambil dengan cara observasi langsung yaitu; komunikasi antarsuku, pertemuan rutin, dan dialog antarwarga.



B. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang secara tertulis yang tersimpan di Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Waypanji, kantor Kepala Desa Balinuraga dan kantor Kepala Desa Agom. Selain itu, surat kabar harian lokal dan penelitian terdahulu menjadi data penguat dalam penelitian ini.

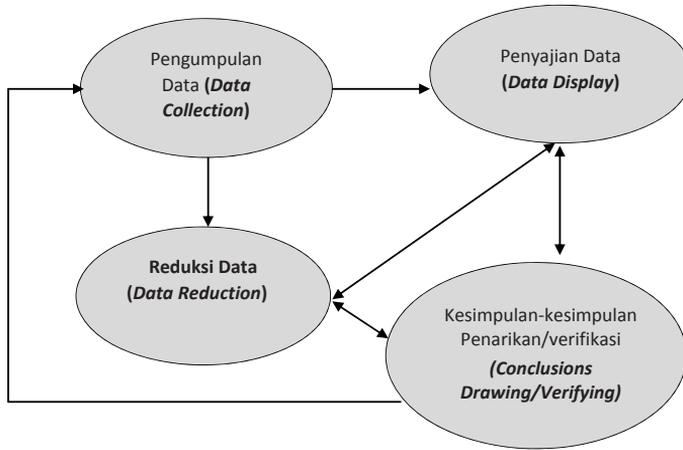
C. Metode Analisis Data

Proses analisis data kualitatif dimulai dari pengumpulan data, baik terhadap data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang hasilnya dibuatkan transkrip hasil wawancara. Demikian juga informasi hasil observasi yang digunakan untuk melakukan triangulasi atas hasil wawancara. Data sekunder yang diperoleh dari kantor camat, kepolisian, kepala desa dan surat kabar harian lokal menjadi sumber pendukung yang memperkuat data primer.

Analisis atas data kualitatif dilakukan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh Huberman dan Miles, 1984 (*dalam* Denzin dan Lincol, 1994), yang dikenal dengan interaksi. Model ini dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data yang sudah teranalisis, dan penarikan kesimpulan. Secara lengkap, model tersebut diperlihatkan pada gambar 3.3.

Data dikelompokkan secara sistematis dan dilakukan analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan narasi yang bermakna. Penyajian data sudah melalui tahap reduksi dan triangulasi dengan mengonfirmasi data dari satu sumber dengan sumber-sumber yang lain sehingga data yang disajikan di dalam penelitian ini adalah data yang benar-benar valid.





Gambar 3.3 Model Analisis Interaktif

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi Desa Agom Kecamatan Kalianda dan Desa Balinuraga Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Dipilihnya desa tersebut karena desa tersebut dihuni oleh warga transmigrasi dan warga pendatang yang relasi sosialnya berdinamika. Awal kehadiran, relasi sosial mereka asosiatif namun belakangan karena telah menurunkan generasi muda yang telah tersentuh oleh budaya-budaya modern maka relasi tersebut mengalami pergeseran menjadi relasi disosiatif yakni mengalami konflik antarsuku tersebut. Meskipun telah terjadi konflik, kedua suku ini masih hidup secara berdampingan dan satu sama lain tetap saling menghormati. Hal ini dapat terlihat dari 6 tahun setelah terjadi konflik besar-besaran yakni tahun 2012, namun sudah 6 tahun setelah konflik selesai tidak ada indikasi akan terjadi konflik susulan sekalipun konfliknya kecil. Yang ada justru kerja sama yang erat dan beragamnya aktivitas ekonomi setelah masuknya proyek Jalan Tol Sumatera.



BAB 4

GAMBARAN UMUM RELASI SOSIAL WARGA DESA AGOM DAN DESA WARGA BALINURAGA DI LAMPUNG SELATAN

Lampung Selatan adalah satu dari lima belas kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Dengan semboyan “*Sang Bumi Dua Jurai*” yang berarti satu wilayah dihuni oleh dua keturunan yaitu Lampung Suku Peminggir dan Lampung. Suku Pubian adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung tenggara Pulau Sumatera dengan luas wilayah 700,32 km² dihuni sebanyak 1.269.262 jiwa. Penduduk yang bermukim di daerah itu secara garis besar digolongkan menjadi dua golongan yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli adalah penduduk Lampung yang bersuku Peminggir yang dominan bermukim di sepanjang pesisir pantai. Sedangkan penduduk pendatang yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh tersebar di Kabupaten Kalianda.

Kabupaten Lampung Selatan kaya sumber daya alam pantai dan pertanian, sehingga kedua sumber daya tersebut merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat yang bermukim di Lampung Selatan. Nelayan adalah mata pencaharian yang dapat diandalkan selain sektor pertanian. Para nelayan umumnya bermukim di pantai timur dan selatan yang sebagian besar adalah para nelayan berasal dari Jawa Timur dan

Sulawesi. Para nelayan menjual hasil tangkapan ikannya di pelelangan ikan. Oleh karena itu, pelelangan ikan adalah tempat berkumpulnya seluruh penduduk Lampung Selatan yang ingin mengonsumsi ikan tidak saja untuk dikonsumsi secara subsitens tetapi juga untuk dijual di pasar. Sedangkan sektor pertanian lebih didominasi oleh penduduk asli Lampung Selatan.

Penduduk Lampung Selatan adalah penduduk yang multikultur sehingga terdapat beragam adat dan kebiasaan sesuai dari daerah asalnya. Adat tersebut dapat dilihat dari praktik-praktik upacara pernikahan, kelahiran, kematian, dan juga praktik keagamaan. Selain itu dapat dilihat dari pakaian adat yang digunakan pada saat hari-hari besar seperti perkawinan. Selain itu, pakaian adat juga sering kali digunakan pada saat memenuhi undangan resmi dari pemerintah daerah. Tidak hanya itu, logat dalam berkomunikasi juga menjadi ciri masing-masing suku.

Meskipun penduduk Lampung Selatan ini multikultur dan lebih didominasi oleh suku Lampung, namun bahasa yang digunakan tidak dominan bahasa lokal, akan tetapi lebih menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Itulah sebabnya untuk menjalin komunikasi dengan penduduk setempat para pendatang tidak mengalami kesulitan, karena menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga halnya dengan sikap terbuka terhadap perbedaan dari berbagai suku telah menjadi bagian karakter penduduk Lampung Selatan.

Lampung Selatan terkenal dengan propinsi yang menjunjung tinggi adat istiadat. Nilai yang dianut bersumber dari ajaran agama Islam. Selain itu ada nilai lokal yang termuat di dalam filosofi Suku Lampung. Suku Lampung melestarikan adat budaya Lampung melalui bangunan rumah adat (Gambar 4.1), lagu adat Lampung, tarian, upacara perkawinan, pakaian adat (Gambar 4.2) dan juga pergaulan muda-mudi.





Gambar 4.1 Bangunan Rumah Adat Lampung Saibatin

Sumber: <http://batinbudayapoerba.blogspot.com/2013/11/rumah-adat-lampung-lambang-kesatuan.html>



Gambar 4.2 Gambar Baju Adat Lampung Saibatin

Sumber: <https://bajutradisionals.com/baju-adat-lampung/baju-adat-lampung-saibatin/>



Masyarakat multikultur di Lampung merupakan aset untuk kemajuan Lampung selatan, bukan saja kekayaan budaya yang ada tetapi juga pembangunan secara fisik telah melaju pesat di Lampung Selatan, seperti adanya pembangunan sejumlah fasilitas transportasi yang skalanya nasional seperti Bandara Udara Raden Intan II, Pelabuhan Bakauheni, Gerbang Tol Sumatera. Adanya pelabuhan udara dan laut serta darat tersebut menjadikan daerah Lampung Selatan adalah daerah yang strategis. Selain itu ada pembangunan Ikon Lampung dan Tugu Siger yang menjadi identitas Lampung Selatan yang diresmikan pada tahun 2008. Menara Siger merupakan kebanggaan Lampung merupakan perpaduan antara teknologi, budaya dan juga pariwisata (Gambar 4.3).



Gambar 4.3 Menara Siger Identitas Lampung

Sumber:<http://pesawarantanjungputuslampung.blogspot.com/2016/01/menara-siger.html>

Menara Siger yang merupakan icon Lampung Selatan dibangun untuk memperkaya daerah tujuan wisata pantai seperti Pantai Merak Belantung, Pantai Teluk Nipah, Pantai Ketang, Pantai Sebesi, Pantai

Bagus, Pantai Semenu, Pantai Batu Lapis, dan Pantai Kalianda Resort. Karena itu, di daerah Lampung Selatan banyak didirikan hotel-hotel berbintang seperti Hotel kalianda, Hotel Way Urang, Hotel Beringin, Hotel Alau-alau Boutique Resort, Hotel Grand Elty, Krakatoa Kalianda Resort, Hotel Negeri Baru.

Lampung Selatan yang dikelilingi oleh pantai, mereka memanfaatkan sumber daya laut menjadi menu konsumsi sehari-hari. Ikan laut, kepiting, cumi-cumi dan udang adalah konsumsi yang sangat mudah diperoleh di pasar-pasar tradisional dan tempat pelelangan ikan BOM Kalianda. Aktivitas pelelangan ikan di TPI BOM Kalianda (Gambar 4.4) akan dibuka setiap hari pukul 14.00 WIB setelah kapal-kapal nelayan merapat ke dermaga.

Desa Balinugara dan Desa Agom adalah dua Desa secara administratif masuk dalam Kabupaten Lampung Selatan. Kedua desa ini adalah desa yang berbeda dari penghuninya. Di Desa Agom merupakan desa adat karena desa tersebut dibangun oleh suku Lampung sehingga penghuninya didominasi oleh Suku Lampung. Sedangkan Desa Balinuraga adalah desa yang dibangun oleh Suku Bali yang merupakan transmigran ke Lampung pada tahun 1962. Mereka menghuni Desa Balinuraga atas instruksi pemerintah yang menghendaki mereka direlokasi oleh pemerintah karena daerah mereka terkena letusan gunung api.

Desa Balinuraga dan dan Desa Agom adalah dua desa yang disatukan di dalam Kabupaten Lampung Selatan, meskipun mereka satu dalam kabupaten namun letak dua desa tersebut dipisahkan oleh kecamatan sehingga kedua desa tersebut secara geografis terletak di wilayah yang berbeda. Gambaran umum terkait dengan karakteristik sosial budaya dari kedua desa tersebut diuraikan di bawah ini.





Gambar 4.4 Aktivitas Pelelangan Ikan di TPI BOM Kalianda

Sumber: <https://www.cendananews.com/2017/01/melihat-dari-dekat-aktivitas-pelelangan-ikan-di-tpi-bom-kalianda-lampung.html>

A. Desa Agom

1. Wilayah Administratif dan Sarana Prasarana Desa Agom

Saat memasuki Desa Agom tampak ucapan selamat datang di pintu masuk dengan ornamen ciri khas suku Lampung Selatan yaitu siger. Ornamen tersebut secara simbolis desa ini dihuni oleh penduduk yang bersuku Lampung, sehingga dapat disebut desa ini adalah desa lama atau dalam bahasa lokalnya *pekon*.

Secara administratif Desa Agom adalah 1 dari 5 desa yang berada di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan dihuni oleh dominan warga Suku Lampung yaitu suku Peminggir. Dengan jumlah penduduk 2.885 jiwa dan 787 kk tersebar di 5 (lima) dusun, yaitu: Dusun Sukajaya, Dusun Agom, Dusun Banyumas, Dusun Warungin Harjo, dan Dusun Kenihai dan 17 (tujuh belas) Rukun Tetangga (RT). Mereka membangun rumah tersebar ke ini membangun rumah mengikuti tepi jalan-jalan utama. Di sekitar mereka telah ada jalan utama yang beraspal yang menghubungkan desa mereka ke tempat-tempat pusat keramaian dan pusat kota di Lampung Selatan. Sungguhpun begitu di desa ini tidak ada angkutan umum, sehingga warga menggunakan kendaraan pribadi dan ojek apabila hendak melakukan perjalanan ke luar desa.

Desa yang terletak di sebelah utara berbatasan dengan Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda, sebelah barat berbatasan dengan Desa Taman Agung Kecamatan Kalianda dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Suka Tani Kecamatan Kalianda, awal mulanya bukanlah untuk pemukiman karena Desa Agom ini berawal dari tempat pertanian warga yang didatangi setiap pagi dan akan ditinggalkan apabila sore hari. Itulah sebabnya warga hanya mendirikan rumah-rumah yang tidak permanen karena hanya difungsikan tempat berteduh dari panas dan hujan saja dalam waktu sementara. Sementara pemilik lahan memiliki rumah di dekat pusat-pusat keramaian di sekitar Kalianda.



Tampaknya seiring perputaran waktu, warga menyadari bahwa aktivitas pertanian tersebut telah menjadi sektor andalan mereka karena merupakan satu-satunya sumber penghidupan mereka maka sejak saat itu mereka tidak lagi meninggalkan lahan-lahan pertanian begitu saja, namun juga membangun rumah di sekitar lahan pertanian tersebut. Mereka satu per satu membangun rumah permanen diikuti oleh yang lainnya sehingga lahan pertanian tersebut telah menjadi pemukiman warga sampai saat ini.

Sehari-hari warga Desa Agom menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kopi, lada, padi, kedelai, dan kacang tanah termasuk duku dan durian adalah buah-buahan adalah hasil pertanian yang dijadikan sumber pendapatan. Selain itu mereka juga berternak kambing, ayam dan sapi. Selain pertanian, warga juga memiliki pekerjaan sebagai tukang ojek dan travel yang mengangkut penumpang dari terminal Raja Basa Bandar Lampung ke Pelabuhan Merak Bakahuni. Kendaraan yang mereka gunakan seperti minibus untuk travel bukanlah milik mereka akan tetapi milik orang lain, mereka hanya mengoperasikannya.

Kemampuan mengoperasionalkan kendaraan roda empat dan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia menjadi modal utama mereka untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan pihak-pihak luar. Bahkan pendapatan mereka dari pekerjaan ini jauh lebih besar dari pendapatan mereka dari bertani. Sungguhpun demikian, bagi mereka pekerjaan travel ini adalah pekerjaan sampingan saja sambil menunggu panen tiba, pekerjaan utamanya tetap pertanian. Menurut mereka sektor pertanian jauh lebih menjanjikan karena apabila panen mereka akan mendapatkan hasil yang bisa mencukupi kebutuhan yang sifatnya tahunan.

Sejak berdirinya pemukiman tersebut Desa Agom belum terbentuk kepengurusan desa, sehingga warga mengatur dirinya sendiri dan menjadi pemimpin untuk masyarakat sekitar apabila dibutuhkan. Dengan modal ajaran agama Islam yang dianut mereka menjalankan kehidupan dengan syariat-syariat agama. Namun



sekarang pengurusan secara formal telah terbentuk. Terdapat kepala desa dan pengurus lainnya. Bahkan ada kantor kepala desa yang bertugas untuk melayani warga sekitar. Kantor kepala desa dibangun di tanah desa dan dilengkapi sarana perkantoran. Kantor kepala desa dibangun dengan menggunakan ornamen Siger Lampung Selatan yang merupakan ciri khas warga Lampung Selatan (Gambar 4.5).



Gambar 4.5 Kantor Desa Agom

Meskipun demikian Desa Agom tetap secara administratif masuk dalam kabupaten Lampung Selatan, sehingga apabila mereka membutuhkan keperluan-keperluan yang sifatnya resmi seperti mengurus akta kelahiran, KTP, dan surat nikah mereka akan mengurusnya di Kabupaten Kalianda. Seiring dengan waktu, terdapat perkembangan dan pemekaran kabupaten ditambah lagi dengan perkembangan penduduk dan permukiman semakin bertambah maka Desa Agom masuk dalam wilayah administrasi di Kecamatan Kalianda dengan surat keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2002.



Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat warga Desa Agom memiliki pemimpin tidak saja pemimpin formal seperti kepala desa tetapi, RW, RT tetapi juga memiliki tokoh-tokoh lokal seperti tokoh adat Lampung dan tokoh agama serta tokoh pemuda. Bagi warga peran tokoh-tokoh tersebut sangat berarti dalam kehidupan mereka. Persoalan-persoalan hidup yang dihadapi seperti keinginan dan harapan terhadap kemajuan desa sering kali mereka kemukakan di hadapan para tokoh. Bahkan apabila ada persoalan yang sifatnya pribadi mereka tidak kemukakan pada para tokoh. Tokoh-tokoh tersebut memberikan solusi yang sifatnya konstruktif. Meskipun persoalan itu tidak selesai namun setidaknya mereka memperoleh penguatan dalam hidup sehingga mereka merasa termotivasi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Di Desa Agom telah ada penerangan 24 jam sejak tahun 1992, saat itu ada program listrik masuk desa dari pemerintah, sehingga setiap rumah dapat mengakses listrik. Namun demikian, jalan-jalan utama di Desa Agom tidak ada lampu jalan sehingga saat malam jalan gelap gulita, kecuali ada warga yang bersedia memberikan aliran listrik ke jalan untuk penerangan jalan. Namun tampaknya penerangan yang berasal dari warga tidak cukup untuk penerangan karena ukuran wattnya kecil. Tidak jarang warga yang keluar malam akan menggunakan lampu kendaraan saja untuk penerangan atau apabila warga tidak menggunakan kendaraan maka warga menggunakan senter untuk penerangan.

Warga Agom termasuk sangat peduli dengan kesehatan. Saat mereka sakit, mereka mendatangi tenaga kesehatan di puskesmas. Puskesmas dan tenaga kesehatan bersedia melayani mereka meskipun tidak 24 jam. Namun dengan layanan prima maka warga memperoleh layanan dari tenaga medis apabila dibutuhkan. Khusus ibu hamil



dan menyusui menjadi perhatian penuh dari puskesmas desa itulah sebabnya angka kematian ibu melahirkan tergolong rendah di Desa Agom.

Fasilitas pendidikan seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Tingkat Atas juga dijumpai di Desa Agom. Itulah sebabnya tidak ada warga yang buta huruf. Warga sadar akan pentingnya pendidikan dasar sehingga rata-rata warga mampu menyelesaikan pendidikan sampai pada Sekolah Tingkat Atas. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Agom adalah sekolah yang berasal dari pemerintah sehingga bantuan berupa sarana dan prasarana dari pemerintah diterimakan di tingkat pendidikan di desa tersebut. Tidak hanya itu, pondok pesantren juga ada di lingkungan Desa Agom.

Desa Agom yang warganya lebih banyak memeluk agama Islam yang organisasi keagamaannya adalah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, kedua organisasi kemasyarakatan itu tidak banyak dipertentangkan oleh para pemeluknya. Karena itu, maka terdapat masjid dan mushala di lingkungan tempat tinggal mereka. Masing-masing masjid terdapat pengurus masjid dan juga imam masjid yang setiap waktu shalat selalu menjadi imam bagi para jemaahnya. Bagi warga Muslim di Desa Agom (Gambar 4.6), masjid digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu dan juga pengajian rutin bulanan dan juga pengajian untuk memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Isra Miraj. Masjid yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 600 m² ini memiliki bangunan yang kokoh yang dibangun berdasarkan inisiasi masyarakat setempat yang dananya berasal dari swadaya masyarakat dan sumbangan dari pemerintah. Di dalam masjid dilengkapi berbagai sarana seperti kipas angin, pengeras suara dan juga kitab suci Al-Qur'an yang selalu dimanfaatkan warga setiap hari.





Gambar 4.6 Masjid di Desa Agom

Selain masjid terdapat juga mushala yang digunakan oleh warga untuk shalat. Bedanya dengan masjid, mushala ini berkapasitas kecil sehingga apabila shalat warga lebih cenderung untuk menggunakan masjid. Sungguhpun demikian, mushala dalam kondisi terawat, karena setiap hari dibersihkan oleh para pengurus mushala. Biasanya yang menggunakan mushala adalah warga yang rumahnya dekat dengan mushala.

Tidak berbeda dengan masjid mushala ini dilengkapi oleh sarana dan prasarana perlengkapan shalat, seperti pengeras suara, Al-Qur'an, sajadah, karpet dan juga tempat berwudhu. Selain tempat shalat, mushala sering kali dijadikan tempat warga yang dekat rumahnya untuk berkumpul terutama dalam kegiatan pengajian rutin mingguan. Bahkan mushala dijadikan oleh kaum perempuan untuk pertemuan arisan yang dilakukan setiap bulannya.

Meskipun terdapat dua organisasi keagamaan yaitu Muhammadiyah dan NU di Desa Agom, sering kali mengalami perbedaan dalam pelaksanaan praktik-praktik agama bahkan pada pelaksanaan hari

raya saja sering kali berbeda, namun pemeluk agama Islam tidak menjadi persoalan karena mereka mengikuti masing-masing sistem organisasi Islam yang mereka anut. Demikian juga dalam hal praktik-praktik keagamaan, misal dalam kematian. Warga Muhammadiyah tidak mengenal pengajian sampai berhari-hari seperti 3 hari, 7 hari, 40 hari 100 hari bahkan 1.000 hari. Sedangkan NU mengenal itu dan melaksanakannya. Namun keduanya saling menghargai dan menghormati praktik-praktik pelaksanaannya.

Sarana olahraga seperti lapangan olahraga juga terdapat di Desa Agom. Lapangan tersebut bisa digunakan untuk pertandingan sepak bola yang dimeriahkan oleh seluruh warga yang ada di sekitar Kalianda dan juga kecamatan lainnya seperti Kecamatan Way Panji. Warga tidak saja mengirimkan pemain sepak bola tetapi juga ikut menjadi *supporter* pertandingan. Bagi warga menang dan kalah bukan menjadi soal, yang penting mereka bisa bertemu dan berkumpul dengan warga yang berlainan kampung adalah hal yang lebih penting. Media itu juga dijadikan sarana untuk saling mengenal dan juga media silaturahmi warga. Selain itu, lapangan ini juga digunakan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI). Biasanya seluruh siswa-siswi SD sampai SMP yang ada di Desa Agom berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan upacara bendera. Tidak hanya itu, lapangan ini juga dimanfaatkan warga untuk melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha yang dilaksanakan setahun sekali.

2. Pemukiman dan Nilai Warga Desa Agom

Pola pemukiman warga Desa Agom berkelompok mengikuti arah jalan. Rumah-rumah permanen tersebut dibangun menghadap ke utara dan ke selatan dengan jarak yang tidak begitu berjauhan. Masing-masing rumah hanya dibatasi oleh pekarangan pemilik tanpa ada penyekat atau tembok. Luas tidaknya rumah sangat bergantung pada keadaan ekonomi warga. Namun secara umum rumah-rumah warga dibangun dengan luas tanah di atas 300 m ke atas.



Masing-masing rumah memiliki pekarangan yang luas. Namun tidak semua rumah dipagar karena warga beranggapan bahwa dengan dipagarnya rumah bermakna bahwa tuan rumah membuat jarak dengan tetangga. Padahal bagi mereka tetangga adalah saudara sendiri karena mereka saling mengenal sejak lama.

Rumah-rumah warga Agom umumnya sudah permanen. Namun ada beberapa warga yang membangun rumah adat Lampung. Ketika ditanya lebih jauh tampaknya membangun rumah adat merupakan keinginan untuk melestarikan adat Lampung yang hampir punah, karena model rumah-rumah modern jauh lebih praktis dan secara estetika lebih indah dipandang dibandingkan rumah adat yang bahan bangunannya jauh lebih mahal dan langka. Hal ini disebabkan karena rumah adat Lampung berbahan dasar kayu jati dan kayu mahoni. Umumnya rumah adat dibangun tinggi paling tidak ada 5 anak dari tanah untuk mencapai rumah hunian. Sedangkan penataan ruangan umumnya tidak disekat-sekat selain kamar tidur dan dapur.

Sehari-hari warga Desa Agom menggunakan bahasa lokal (Lampung), tepatnya mereka menggunakan bahasa Lampung Pubian. Bahasa lokal ini mengenal tingkatan-tingkatan yaitu halus dan kasar. Penggunaan tingkatan kosakata adalah pertanda untuk menunjukkan bahasa yang halus dan bahasa yang kasar.

Warga Desa Agom yang dominan Suku Lampung Pesisir memiliki falsafah hidup yang dikenal *fiil pesengiri*. Falsafah hidup ini dijadikan pijakan untuk menjalin pergaulan baik sesama warga yang satu suku maupun dengan suku lain. Kadang kala falsafah ini dijadikan pijakan untuk mencapai kesejahteraan. Falsafah ini terpatri dalam kehidupan sehari-hari yang selalu disosialisasikan secara turun menurun.

Mengacu pada Irianto dan Margatha (2011); Harirama (2004); Sinaga (2014), secara rinci falsafah hidup suku Lampung yang dikenal dengan *fiil pesenggiri* yang memuat hal-hal sebagai berikut: *pertama, Juluk-Adek*, artinya memiliki gelar. *Juluk* adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda



atau remaja yang belum menikah, dan *adek* bermakna gelar/nama panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat.

Jeluk-adek ini dilakukan pada upacara adat yang dilakukan pada saat pernikahan. Upacara adat ini dihadiri oleh para ketua adat dan warga untuk meresmikan nama gelar. Biasanya gelar yang diberikan untuk laki-laki adalah *Pengiran, Dalom, Batin, Temunggung, Radin, Minak, Kimas*. Sedangkan untuk perempuan, adalah *Ratu, Idoman, Pujian, Pimpinan, dan Tuan Ratu*. Dalam hal ini masing-masing *kebuwaian* tidak selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Dalam praktiknya sehari-hari menurut adat Lampung, pemberian nama atau gelar secara adat setelah menikah, menjadi identitasnya. Dengan demikian, seseorang yang telah menikah lebih terhormat apabila dipanggil dengan nama pemberian secara ada. Bahkan apabila bukan untuk urusan administratif yang formal, maka nama pemberian secara adat menjadi identitasnya dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan nama yang diberikan sejak lahir sering kali tidak lagi digunakan.

Panggilan gelar yang diberikan setelah menikah menurut adat Lampung adalah bentuk penghargaan seseorang kepada yang bersangkutan. Penghargaan tersebut merupakan harapan dari keluarganya. Pemberian gelar tersebut juga menunjukkan identitasnya dari mana dan keturunan siapa yang bersangkutan berasal. Itulah sebabnya bagi warga Lampung, untuk menghargai satu sama lain, bukan nama asli yang dipakai untuk identitasnya melainkan nama pemberian secara adat yang diperolehnya dari upacara saat proses pernikahan berlangsung sebelum ijab kabul berlangsung.

Kedua, Nemui-Nyimah, bermakna adalah tulus ikhlas dalam menerima tamu. Tamu yang dimaksud adalah orang di luar keluarganya. Makna ini juga dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian kepada orang lain, karena di dalam falsafah itu terdapat makna pada saat



menerima tamu, maka selayaknya tamu diberi makanan dan minuman yang layak. Bahkan apabila tuan rumah tidak memiliki makanan yang layak, maka dia bertanggung jawab untuk menyediakan dengan cara yang semaksimal mungkin. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa keinginan untuk melayani orang lain menjadi tujuan utama dari sikap hidup suku Lampung. Selain sikap peduli juga terkandung makna bahwa suku Lampung suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Sikap terbuka dan mengutamakan ketulusan dalam memberi adalah nilai yang telah lama terpatri di dalam kehidupan suku Lampung.

Ketiga Nengah-Nyappur. *Nyappur* berasal dari kata benda *cappur* menjadi kata kerja *nyappur* yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antarsesama. *Nengah-nyappur* menunjukkan bahwa karakter suku Lampung bergaul tanpa pilih kasih, tanpa membedakan latar belakang seseorang, agama, suku dan budaya. Bagi mereka bergaul adalah menunjukkan bahwa mereka berinteraksi satu sama lain yang pada akhirnya akan membawa keberuntungan, minimal menambah jaringan sosial. Bagi orang Lampung bergaul adalah kunci agar memiliki pengalaman, pengetahuan bahkan kesempatan yang luar yang tidak bisa diperoleh dari dalam rumah, keluarga namun dari pergaulan.

Keempat, Sakai-Sambaiyan. *Sakai* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam praktiknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan *sambaiyan* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan. *Sakai sambaiyan* berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. *Sakai-sambayan* pada hakikatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.



Sakai sambayan bagi Suku Lampung adalah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dengan cara menanam jasa dan kebaikan untuk memperluas jaringan. Itulah sebabnya Suku Lampung sering kali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tujuan agar terjalin tali persaudaraan yang lebih erat. Biasanya *sakai sambayan* ini tidak dilakukan pada sesama Suku Lampung saja, melainkan pada suku-suku lain yang ada di Lampung. Utamanya lagi *sakai sambayan* ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak hanya sekampung melainkan juga di luar perkampungan mereka. Lebih detail lagi *sakai sambayan* ini identik dengan gotong royong.

Falsafah hidup Suku Lampung tersebut terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak membeda-bedakan satu suku dengan suku lainnya, bahkan bekerja sama dengan suku-suku lain menjadi tujuan utama. Karena itu, falsafah hidup ini dijadikan media untuk menyelesaikan perselisihan dalam pergaulan hidup sehari-hari, sehingga nilai yang terkandung di dalam filosofi tersebut untuk mempersatukan antarsuku yang ada di Lampung.

Bagi Suku Lampung, nilai falsafah hidup tersebut merupakan sumber harga diri, mereka akan menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang tertera di dalam falsafah tersebut. Sehubungan dengan itu, maka apabila ada yang merusak nilai yang dipegang teguh oleh suku Lampung, maka Suku Lampung akan melakukan perlawanan baik secara pribadi atau secara berkelompok. Bahkan prinsip hidup mereka lebih baik mati daripada tidak ada harga diri.

Suku Lampung menganut budaya patriarki. Garis keturunan ayah atau laki-laki sangat dominan. Hal ini dapat ditelusuri dengan konsep nilai *muakhri* yang mereka anut. *Muakhri* adalah persaudaraan yang berstatus antara kakak dan adik yang berstatus sedarah yang kemudian bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keluarga tersebut. Tampaknya konsep *muakhri* tersebut semakin meluas, bukan saja dikhususkan pada hubungan persaudaraan yang sedarah melainkan juga persaudaraan yang tidak sedarah atau adopsi. Namun



status hubungan yang tidak sedarah ini sama kuatnya dengan persaudaraan yang sedarah. Biasanya hubungan persaudaraan yang tidak sedarah dapat diperoleh hasil adopsi yang bersifat baik, misalnya pemberian gelar kepada salah satu orang yang dihormati atau juga dari hubungan yang semula tidak baik seperti ada kasus kecelakaan, pencurian ataupun pertikaian maka setelah kasus itu diselesaikan secara damai maka akan terjadi hubungan persaudaraan dengan menggunakan konsep *angkon muakhri*.

Dalam keluarga Suku Lampung, anak laki-laki merupakan penerus keturunan mereka. Anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar di dalam keluarga karena posisinya adalah pengganti orang tua. Itulah sebabnya sejak kecil anak laki-laki telah “dituakan” oleh saudaranya sekalipun anak laki-laki tersebut posisinya adik. Sebutan untuk anak laki-laki biasanya dipanggil “*Minak, Abang*, bahkan ada yang telah memberi gelar seperti *Tuan Isinan*”. Sedangkan anak perempuan tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Mengurus kehidupan lansia orang tuanya adalah tanggung jawab anak laki-laki. Itulah sebabnya anak laki-laki sering kali tidak diperbolehkan keluar dari rumah orang tuanya setelah menikah sekalipun kondisi ekonomi sudah mapan. Kalaupun keluarga tersebut akan keluar rumah, maka orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan sebuah rumah untuk anak laki-laki.

Sedangkan status anak perempuan di dalam keluarga Lampung adalah “*mirul*”, setelah dia menikah maka anak perempuan adalah milik suami dan mertuanya, sehingga setelah menikah dia akan ikut dengan mertuanya, bahkan tinggal serumah dengan mertuanya. Kewajiban untuk mengabdikan bukan lagi pada orang tua, melainkan pada keluarga suami. Oleh sebab itu, saat masih tinggal dengan orang tuanya, maka anak perempuan Suku Lampung mendapatkan kasih sayang dari orang tua tidak akan mengalahi sayangnya dengan anak laki-laki. Bagi mereka memiliki anak gadis atau dalam bahasa lokalnya “*anak muli*” merupakan kebanggaan dan kehormatan.



Warga Desa Agom menganut agama Islam yang melakukan praktik sosial keagamaan dengan menjalankan tradisi untuk menyambut Bulan Ramadhan tradisi *ngelop haga puasa*. Meskipun budaya ini bermula berasal dari Suku Lampung, tetapi setiap tahun tradisi ini diikuti oleh para penganut agama Islam yang bukan saja Suku Lampung. Praktiknya mereka beramai-ramai mandi di laut dengan tujuan membersihkan diri untuk menjalankan ibadah puasa (Gambar 4.7).



Gambar 4.7 Tradisi Menyambut Bulan Ramadhan di Kalianda

sumber:<http://www.lampost.co/berita-ratusan-masyarakat-lampung-selatan-ngelop-di-laut-sambut-bulan-puasa.html>

3. Nilai Agama untuk Perdamaian

Selaku pemeluk agama Islam, Suku Lampung yang bermukim di Desa Agom selain memegang teguh filosofi Lampung yaitu *fiil pesenggiri*, nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam dijadikan pedoman untuk melaksanakan perdamaian. Al-Qur'an dan Hadis menjadi penuntun yang pedoman untuk menjalin relasi di lingkungan tempat tinggal mereka yang dikenal oleh warga adalah masyarakat multikultural atau dalam bahasa lokalnya *ragom*. Ajaran berbuat baik untuk menjaga perdamaian telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang keduanya menjadi penuntun untuk menjalin relasi dengan sesama



manusia. Berikut adalah sebagian kecil tentang ajaran berbuat baik yang tertera di dalam Al-Qur'an, Surat Al-Hujarat ayat 13:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan Kami menjadikan kamu beberapa bangsa dan beberapa suku-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal satu sama lain.

Dari ayat tersebut warga Islam Lampung menyakini bahwa asal manusia adalah dari Adam dan Hawa yang apabila ditarik ke bawah, meskipun berbeda suku namun mereka adalah saudara, sehingga setiap warga berupaya untuk bersikap saling menghargai sesama saudara sekalipun berbeda agama.

Menghargai perbedaan agama juga telah diketahui oleh warga muslim Lampung dari Al-Qur'an Surat Al-Kafirun, ayat 6 yaitu: *"Untukmu agamamu dan untuk aku agamaku"*. Dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mengatur harmonisasi dalam menjalankan perbedaan agama. Karena itu, Warga Lampung selalu memiliki sikap yang toleransi beragama. Terlebih lagi pemahaman mereka tentang Al-Qur'an, Surat Ar-Rum, ayat 22:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan"bahasamu" dan "warna kulitmu". Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Dalam ayat tersebut warga Islam meyakini bahwa pluralisme telah diatur oleh yang Kuasa, dan tugas manusia adalah saling menghargai perbedaan tersebut. Itulah sebabnya warga Lampung tidak melihat fisik dan warna kulit mereka terbuka dengan warga pendatang dengan membawa adat istiadat dan agama mereka yang tentu saja berbeda dengan warga Lampung Selatan.

Selain itu, dari riwayat Attirmidzi-Jabir r.a, Nabi Muhammad Saw. bersabda: *Sesungguhnya orang yang sangat saya kasih dan yang terdekat padaku di hari qiamat adalah yang terbaik budi pekertinya. Dan orang yang sangat saya benci dan terjauhi dari padaku pada hari qiamat yaitu orang yang*



banyak bicara, sombong dalam pembicaraannya dan berlagak menunjukkan kepandaiannya”

Dari Hadis di atas Nabi Muhammad menekankan pada kebaikan budi pekerti manusia, karena Nabi turun ke muka bumi ini ditugasi Allah Swt. untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Perbaikan budi pekerti sangat penting mengingat bahwa pluralnya masyarakat membawa adat istiadat yang berbeda-beda sehingga kalau tidak diatur maka akan terjadi kekacauan. Hal ini terungkap dalam Al-Qur’an, Surat An-Nur, ayat 27: *“Jangan engkau memasuki yang bukan rumahmu selain meminta izin terlebih dahulu dan memberi salam kepada penghuninya”*.

Sehubungan dengan menegakan budi pekerti, diatur juga ajaran untuk mempererat tali silaturahmi dan juga bertetangga, seperti yang terungkap dalam Hadis Nabi Muhammad:

“Hai segenap manusia, sebarkanlah salam, sedekahlah makanan dan sambunglah tali persaudaraan (silaturahmi) serta shalatlah di kala manusia tidur di kegelapan malam, niscaya kamu masuk surga dengan penuh kesejahteraan” (HR At Tarmidzi).

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya serta barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam” (HR Buhari Muslim).

Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 36: *dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu apa pun, dan berbuatlah untuk ibu-bapak, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang menjadi kerabat, tetangga yang bukan kerabat, teman dalam perjalanan, orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Tuhan itu tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan dirinya.*

Ajaran perdamaian di muka bumi dilatarbelakangi bahwa umat Islam akan menjalin relasi yang luar untuk memperoleh kemajuan baik di bidang ekonomi, budaya dan juga politik, sehingga pemahaman akan perbedaan telah terinternalisasi oleh para penganutnya. Harapannya apabila terjadi perbedaan maka sikap toleransi yang dimunculkan,



buka emosi yang pada akhirnya menimbulkan perpecahan sehingga menimbulkan permusuhan dan juga kemunduran peradaban.

Sehubungan dengan itu, maka ajaran Islam untuk menjalin silaturahmi merupakan hal yang ditonjolkan karena dengan itu, maka berbagai kesempatan untuk maju menjadi lebih besar. Silaturahmi di sini bukan saja terbatas pada relasi yang memiliki hubungan sedarah dan seagama saja, akan tetapi lebih dari itu relasi yang diharapkan adalah relasi lintas agama, lintas suku dan juga lintas bangsa. Dengan demikian, budaya perdamaian akan terjalin erat.

Bagi umat Islam, bahwa ajaran untuk berdamai telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis yang keduanya diyakini oleh penganutnya menjadi penuntun yang benar. Karena itu, tidak Islam selalu mengajarkan menghargai perbedaan baik agama, suku dan juga budaya agar tidak terjadi *cultural shock* (Sulastomo, 2004).

B. Desa Balinuraga

1. Wilayah Administratif dan Sarana Prasarana Desa Balinuraga

“Selamat Datang di Desa Balinuraga”, tulisan tersebut terdapat di gapura yang berornamen khas Bali yang letaknya berada di pintu masuk Desa Balinuraga (Gambar 4.8). Dari ornamen di gapura tersebut menandakan bahwa desa tersebut adalah desa yang penghuninya Suku Bali. Hal ini diperkuat lagi dengan berdirinya bangunan-bangunan untuk sesembahan di samping pintu masuk.

Secara administratif desa ini adalah 1 dari 7 dusun yang ada di Kecamatan Way Panji Lampung Selatan yang terdiri atas 5 dusun penghuninya adalah orang Bali yang menganut agama Hindu, sedangkan 2 dusun lainnya penghuninya menganut agama Islam.





Gambar 4.8 Gapura Desa Balinuraga

Awal berdirinya Desa Balinuraga didirikan oleh Suku Bali yang mengikuti transmigrasi pada tahun 1950 ke Lampung. Salah satu tujuan pemerintah memindahkan warga Bali ke Lampung adalah untuk pemerataan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan para transmigran. Sehubungan dengan itu, maka para transmigran yang dari Bali ditempatkan di Desa Agom. Sejak saat itulah terjadi harmonisasi kehidupan antara Suku Bali sebagai pendatang dan Suku Lampung yang merupakan suku pribumi. Mereka hidup dalam satu wilayah yang menyandarkan sumber penghidupan pada sektor pertanian.

Tampaknya Suku Bali memiliki keinginan untuk bermukim di tempat lain yang dianggap oleh mereka lebih menjanjikan kehidupan terutama dari kesuburan tanah untuk dijadikan lahan pertanian. Terlebih lagi pemerintah memberikan tanah seluas untuk dijadikan pemukiman para transmigran. Tanah tersebut adalah tanah milik perkebunan inti rakyat diberikan untuk pada transmigran.



Sehubungan dengan itu, Suku Bali yang bermukim di Desa Agom ini termotivasi untuk membangun pemukiman baru yang diberi nama Desa Balinuraga.

Awalnya Desa Balinuraga masuk dalam Kecamatan Kalianda. Namun sejak adanya program pemekaran maka Desa Balinuraga masuk dalam Kecamatan Way Panji. Batas-batas yang diketahui adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sidoreno Kecamatan Way Panji, sebelah barat berbatasan dengan Desa Way Gelam Kecamatan Candipuro dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Jaya Kecamatan Palas.

Desa Balinuraga yang memiliki visi: kebersamaan dalam membangun demi Desa Balinuraga yang lebih maju. Visi Desa Balinuraga tersebut diturunkan menjadi misi seperti: 1) menjadi bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada; 2) bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif; 3) bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Bali Nuraga yang aman, tenteram, dan damai, bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 4) memproduktifkan lembaga-lembaga yang kompeten di bidang pertanian; 5) membangun sarana-sarana infrastruktur untuk peningkatan hasil pertanian, pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada pelaku-pelaku pertanian; 6) mencari terobosan baru guna memperoleh hasil yang lebih baik (dokumen Desa Balinuraga, 2018).

Dari visi dan misi tersebut, pengurus desa dengan warga saling bersinergi untuk taat pada aturan-aturan administratif dan mendukung urusan-urusan administratif warga dengan pelayanan yang ramah dan cepat. Selain itu mereka bekerja sama untuk membangun desa dengan cara mempertahankan identitas kesukuan dengan cara menjunjung tinggi nilai moral dalam menjalin relasi sosial. Dalam hal kemajuan



ekonomi mereka bekerja keras mengolah dan mendersivikasi tanaman pertanian untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi

Secara administratif Desa Balinuraga memiliki struktur organisasi yang terdiri dari: kepala desa, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan pemerintahan dan kepala dusun. Selain itu, terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berperan aktif membantu berperan aktif membantu Pemerintah Desa dalam menyusun program pembangunan yang struktur organisasi terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Masing-masing kepengurusan tersebut saling berkoordinasi dengan tugas masing-masing bidang yang sehari-harinya bekerja di kantor desa yang terletak di permukiman Bali. Kantor tersebut memiliki khas Bali dengan menggunakan pakaian adat Bali (Gambar 4.9).



Gambar 4.9 Kantor Desa Balinuraga

Di Desa Balinuraga terdapat infrastruktur berupa jalan raya yang menghubungkan desa ke pusat kota yang menjadi pusat perekonomian. Karena itu, pusat-pusat keramaian seperti toko dan pusat-pusat perbelanjaan dapat diakses oleh mereka. Demikian sebaliknya, keberadaan mereka dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak luar. Meskipun demikian, di Desa Balinuraga belum ada angkutan umum yang menghubungkan mereka ke pusat-pusat keramaian, sehingga warga menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil untuk keluar dari desa mereka untuk mengakses keperluan mereka sehari-hari.

Sejak masuknya program listrik masuk desa pada tahun 1991 yang dapat diakses selama 24 jam, maka setiap rumah tangga dapat mengakses fasilitas tersebut. Masing-masing rumah tangga tersedia listrik dan menggunakan alat-alat elektronik. Aktivitas warga juga seakan tidak terbatas karena mereka memiliki penerangan untuk beraktivitas. Bahkan beberapa warga yang membuka warung dan bengkel aktivitas ekonomi mereka dibuka sampai malam hari. Demikian juga anak-anak sekolah bisa beraktivitas belajar sampai malam hari, bahkan ada anak-anak yang mengikuti les privat pada guru-guru sekolah agar kemampuan akademik mereka dapat meningkat.

Fasilitas kesehatan berupa puskesmas yang disertai tenaga medis tempat mereka berobat apabila sakit. Tidak hanya itu, puskesmas juga tempat melaksanakan imunisasi bagi anak-anak di bawah lima tahun. Fasilitas ini memberikan layanan kesehatan pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 14 WIB. Fasilitas ini juga memberi rujukkan ke pihak-pihak rumah sakit yang lebih lengkap sarana dan prasarannya apabila ada warga yang sakitnya tidak bisa ditangani oleh pihak puskesmas.

Fasilitas pendidikan berupa sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama atas juga terdapat di desa ini. Dengan demikian, warga mampu mengenyam pendidikan tingkat dasar, sehingga tidak ada warga yang buta aksara. Siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah



tersebut bukan hanya dari Desa Balinuraga saja, melainkan dari desa-desa yang ada di sekitar Desa Balinuraga. Sedangkan Sekolah Tingkat Atas tidak ada di Desa Balinuraga, melainkan ada di Kalianda yaitu Sekolah Menengah Tingkat Atas. Sekolah Negeri yang merupakan sekolah teladan di lingkungan Lampung Selatan.

Di Desa Balinuraga terdapat banjar yang merupakan tempat perkumpulan warga (Gambar 4.10). Di banjar tersebut bukan saja warga yang beragama Hindu tetapi juga warga yang beragama Islam. Pertemuan rutin tersebut membahas tentang kemajuan desa dan juga keamanan desa atau tentang hal lain yang dianggap mendukung kemajuan desa. Namun, pertemuan itu jarang dilakukan karena warga dihadapkan oleh kesibukan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi sebagai petani dan juga disibukkan oleh aktivitas-aktivitas sosial lainnya.



Gambar 4.10 Banjar Suku Bali



Selain banjar terdapat juga tempat ibadah warga yang menganut agama Islam. Masjid tersebut digunakan oleh kaum Muslim untuk shalat berjemaah dan pengajian rutin. Hari-hari besar umat Islam seperti Isra Mikraj, shalat Idul Adha, dan Idul Fitri juga dilakukan di masjid yang dibangun dari dana swadaya masyarakat setempat. Perawatan masjid dilakukan secara sukarela oleh warga. Meskipun begitu, kondisi masjid bersih dan lengkap dengan fasilitas seperti kipas angin, karpet, pengeras suara, dan juga Al-Qur'an serta rukuh semua terawat dengan baik.

2. Pola Pemukiman dan Sosial Budaya Warga Desa Balinuraga

Warga Balinuraga membangun rumah secara permanen dengan mengikuti pola jalan-jalan utama. Rumah-rumah dibangun dengan jarak berdekatan (Gambar 4.10). Setiap rumah yang bersuku Bali sangat kental nuansa ornamen Bali yaitu pintu dan jendela dibangun ornamen flora dan fauna. Selain itu, ornamen Bali juga terdapat dihiasi dinding yang dipasang di ruang tamu.

Setiap rumah ada kandang untuk memelihara ternak babi. Kandang ternak tersebut dibangun di belakang rumah dalam keadaan terbuka. Karena itu, sering kali ternak mereka lepas dari kandang dan berkeliaran di daerah pemukiman tetangga. Selain berternak babi, warga juga memelihara ayam dan kambing. Kandang sapi dan ayam juga dibuatkan berdekatan dengan kandang babi.

Selain itu warga Bali juga memiliki kegiatan sosial seperti kerja sama bergotong royong membersihkan lingkungan desa yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali. Gotong royong dilakukan oleh setiap warga baik dengan Suku Jawa maupun Suku Lampung yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Pada saat gotong royong mereka secara bersama-sama menyiapkan makanan dan minuman untuk dikonsumsi secara bersama-sama.





Gambar 4.11 Pola Pemukiman Suku Bali



3. Budaya Perdamaian pada Warga Bali di Lampung

Selaku pemeluk agama Hindu, maka warga Bali menyandarkan nilai agama dalam berperilaku karena di dalam ajaran agama Hindu mengandung nilai moralitas yang menuntun manusia untuk mencapai tujuan tertinggi dan kesejahteraan hidup di dunia. Masyarakat dilandasi oleh *santa jagadhita* atau *sukritagama* yang merupakan masyarakat yang penuh kebahagiaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sehubungan dengan itu, maka dalam kitab suci Veda menyebutkan bahwa:

Hendaknya kemuliaan, keberuntungan dan pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dengan demikian, kami memiliki kesadaran dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, semoga bermanfaat usaha kemajuan (Yajurveda XXV.14).

Perputaran kehidupan selalu akan dijumpai dalam proses kehidupan yang dalam prosesnya akan menemukan kondisi yang menyenangkan dan juga yang menyedihkan. *Janma-mrityu-jara-vyadhi-duhkha-dosa* (Bhagavadgita XIII.9) berupa: kelahiran, kematian, umur, penyakit, penderitaan dan dosa-dosa menjadi pengekang perilaku manusia. Dalam kondisi yang demikian, maka manakala menghadapi tantangan hidup itu semua menjadi motivasi dalam meraih harapan. Demikian sebaliknya apabila mereka mengalami kesenangan maka akan mengingat kondisi yang sulit. Dengan cara seperti itu ada proses penyeimbangan diri dalam hidup.

Bagi warga Bali, tujuan hidup di dunia adalah untuk melaksanakan misi suci untuk mengabdikan dan mengembangkan kasih sayang yang sejati kepada seluruh ciptaanNya. Karena itu, sifat-sifat seperti: *lobha* (rakus/ambisius), *moha* (bingung atau mabuk), *krodha* (emosional atau pemarah), *kasmala* (pikiran kotor), *kama* (dorongan nafsu) dan *matsarya* (iri hati dan dendam) adalah sifat yang harus di jauhi oleh umat Hindu karena dianggap musuh untuk melaksanakan misi suci tersebut.



Medan *Dharma* atau medan perang adalah penjelamaan hidup manusia yang harus diperjuangkan untuk tegaknya moralitas dengan cara menegakkan kebenaran di dalam hati dan pikiran masing-masing yang terimplementasi dalam tindakan sosial keagamaan. Bahkan tindakan spiritualitas menjadi tujuan utama bagi umat Hindu untuk mewujudkan moralitas.

Di dalam kitab suci Veda mengamatkan untuk mengutamakan nilai kerukunan antarsesama melalui dialog, toleransi, solidaritas, dan penghargaan terhadap sesama dengan tidak membeda-bedakan agama, ras, dan suku yang potensial mengakibatkan terjadinya konflik yang bersifat anarkis yang berdampak pada perpecahan bahkan menyebabkan korban jiwa. Karena itu, masing-masing pemeluk agama Hindu meyakini agama menjadi pedoman untuk menjalankan kehidupan. Beberapa amanat moralitas tersebut seperti:

“aku satukan pikiran dan langkah untuk mewujudkan kerukunan di antara kamu. Aku bimbang mereka yang berbuat salah menuju jalan yang benar” (Atharvaveda III.8.5)

Wahai umat manusia. Bersatulah dan rukunlah kamu seperti menyatunya para dewata. Aku telah anugerahkan hal yang sama kepadamu, oleh karena itu, ciptakanlah persatuan di antara kamu (Atharvaveda III.30.4).

Wahai umat manusia. Hiduplah dalam harmoni dan kerukunan. Hendaklah bersatu dan bekerja sama. Bicaralah dengan satu bahasa dan ambillah keputusan dengan satu pikiran. Seperti orang-orang suci di masa lalu yang telah melaksanakan kewajibannya, hendaklah kamu tidak goyah dalam melaksanakan kewajibanmu (Rigveda X.191.2).

Wahai umat manusia. Milikilah perhatian yang sama. Tumbuhkan saling pengertian di antara kamu. Dengan demikian, engkau dapat mewujudkan kerukunan dan kesatuan (Rigveda X.191.4).

Orang-orang yang memberikan penghormatan kepada yang lebih tua, memiliki pikiran yang baik, penuh dengan kesejahteraan. Orang-orang tersebut mudah bersatu dan semua sejalan tanpa terpisahkan. Ucapkanlah kata baik, ramah, dan lembut. Aku menyatukan umat manusia untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian (Atharvaveda III.30.5).



Amanat moral yang disebutkan di atas ditambah lagi dengan keyakinan Suku Bali yang menganut agama Hindu, dengan mengacu pada kitab-kitab susastra Hindu yang intinya mengajarkan kerukunan dan perdamaian baik sesama manusia maupun dengan Tuhan. Hal ini terlihat pada doa-doa yang dipanjatkan oleh Suku Bali di pagi hari dengan mengucapkan “*sarva prani hitankarah*” yang artinya semoga semua makhluk yang bernapas senantiasa sejahtera. Hal yang sama juga pada doa *santi mantram* atau *Subhasita* mantra seperti “*sarve sukhino bhavantu, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pasyanttu, ma kascid dukkha bhag bhaver* yang artinya semoga semuanya memperoleh kebahagiaan, kedamaian dan tumbuh saling pengertian dan semoga semuanya bebas dari penderitaan. Doa tersebut bersumber dari ajaran suci Veda yang menyatakan “semua makhluk sesungguhnya bersaudara” (*vasudhaiva kutumbhakam*).

Nilai moral tersebut telah terinternalisasi ke dalam jiwa masing-masing suku Bali untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan sang pencipta. Bagi mereka memandang orang lain adalah saudara, ibu, bapak, adik, kakak, kakek, dan nenek mereka sendiri. Karena itu, apabila ada yang sakit maka mereka juga merasakan sakit karena bagi mereka orang lain telah dianggap bagian anggota keluarga mereka sendiri.

Selain itu, nilai yang dianut oleh Bali adalah menganggap bahwa setiap makhluk lain adalah saudara sendiri dan juga menganggap apabila terjadi pertentangan, maka tidak dibalas dengan tindakan yang menimbulkan amarah. Sehubungan dengan itu, maka tidak dibalas dengan kemarahan juga karena akan menimbulkan perpecahan persaudaraan. Dengan demikian, warga Bali menekankan nilai persaudaraan sehingga harmonisasi dalam perbedaan merupakan nilai yang dijunjung oleh warga Bali (Titeb, 2004).





BAB 5

DINAMIKA RELASI SOSIAL SUKU BALI DAN SUKU LAMPUNG

Pada bab ini menggambarkan tentang relasi sosial Suku Bali dan Suku Lampung sebelum terjadi konflik. Hal ini penting dilakukan agar diketahui relasi sosial yang terjalin di antara kedua Suku Bali dan Suku Lampung yang sama-sama saling membutuhkan sehingga relasi sosial asosiatif terbangun selama bertahun-tahun.

A. Kerja Sama Suku Lampung dan Suku Bali

Hidup di tempat yang baru dan sebagai transmigran membutuhkan bantuan dari pihak pribumi. Kehidupan mereka yang masih sederhana bahkan dikatakan belum ada aktivitas ekonomi selain memanfaatkan bantuan dari pemberian yang bantuan tersebut sangat terbatas. Keterbatasan tersebut mendorong Suku Bali untuk bekerja sama bahkan meminta bantuan kepada suku Lampung yang merupakan warga pribumi. Saat itu, Suku Lampung memberikan bantuan tidak saja bersifat ekonomi tetapi juga bantuan dalam bentuk pikiran atau ide merupakan bentuk ketergantungan para Suku Bali.

Suku Bali adalah suku pendatang telah lama hidup di Lampung. Sampai saat ini mereka terhitung sebagai generasi ketiga dari Suku

Bali yang hidup di Lampung. Sikap hidup yang keras dan ulet sangat cocok dengan pekerjaan mereka di sektor pertanian di Desa Balinurga. Dengan perekonomian pertanian tersebut telah mengubah kehidupan yang semula sederhana menjadi kehidupan yang tergolong kaya, yang dapat dilihat dari bangunan rumah yang kokoh dan berornamen khas Bali. Selain itu kepemilikan barang-barang berharga seperti kendaraan dan alat-alat teknologi seperti *handphone* telah menjadi bagian hidup mereka.

Sedangkan Suku Lampung hidup tidak begitu tekun memperjuangkan lahan pertanian menjadi sumber mata pencaharian, karena menganggap pekerjaan tani adalah pekerjaan yang kasar, sehingga mereka memilih untuk berdagang atau membuka warung, menjadi tukang ojek, dan menjadi agen-agen travel, serta biro perjalanan. Walaupun mereka bertani, mereka hanya menanam kelapa, padi, kacang dan jagung yang hasilnya hanya dikonsumsi sendiri.

Dengan demikian, tingkat kesejahteraan Suku Bali jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan Suku Lampung. Hal ini tampak pada kepemilikan rumah-rumah Suku Bali yang dibangun secara permanen dilengkapi dengan peralatan rumah tangga yang modern. Sedangkan rumah-rumah Suku Lampung masih banyak yang belum permanen.

Meskipun Suku Bali lebih kaya dibandingkan dengan Suku Lampung, namun tingkat kebergantungan Suku Bali pada Suku Lampung sangat kuat terutama dalam hal kebutuhan daun kelapa. Suku Bali sangat membutuhkan daun kelapa untuk janur dan juga untuk sesembahan setiap tahun bahkan setiap bulannya. Namun Suku Bali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut karena pohon kelapa ditanam oleh Suku Lampung. Tingkat kebergantungan ini sudah sejak lama sehingga kedua suku ini menjalin kerja sama ekonomi dalam hal penyediaan daun kelapa.

Kerja sama antara Suku Lampung dan Suku Bali jauh sebelumnya sudah terjalin. Tidak saja di bidang ekonomi tetapi juga di sosial



dan keagamaan. Mereka melakukan saling mengunjungi apabila ada acara-acara penting di kedua suku tersebut, seperti menghadiri pernikahan, kelahiran dan kematian. Bagi mereka menghadiri acara-acara sosial tersebut merupakan kewajiban dari kedua suku tersebut. Mereka saling memberikan sumbangan baik material ataupun nonmaterial seperti memberikan sejumlah uang untuk pernikahan atau kelahiran. Namun ada kalanya mereka hanya menyumbang tenaga berupa membantu acara-acara tersebut. Suku Bali tidak segan-segan membawa ayam ke tempat acara yang dilaksanakan oleh Suku Lampung. Pemberian tersebut diterima dengan baik oleh Suku Lampung, bahkan tuan rumah mencatatnya di dalam buku bentuk sumbangan mereka. Hal ini bertujuan apabila Suku Bali nanti ada acara maka Suku Lampung akan membalas pemberian Suku Bali tersebut dengan harga yang minimal setara atau lebih dari barang yang diberikannya. Pemberian dari Suku Bali tersebut tidak dibayar lebih rendah oleh Suku Lampung.

Selain itu, gotong royong yang dilaksanakan oleh kedua desa tersebut dilakukan secara rutin baik tiap minggu dan juga sebulan sekali. Kerja sama yang dilakukan oleh kedua suku tersebut juga pada kegiatan memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka sering melaksanakan pertandingan seperti bola voly, sepak bola, balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, pentas seni dan musik. Perlombaan-perlombaan tersebut dilakukan untuk saling memperkuat persaudaraan di antara mereka.

B. Toleransi Beragama

Warga Desa Balinuraga lebih dominan Suku Bali, yang menganut agama Hindu. Sehari-hari mereka memiliki tempat sesembahan di depan rumah masing-masing. Selain itu, mereka sering berkumpul di Banjar untuk melakukan ritual agama Hindu. Sedangkan warga Desa Agom adalah warga Suku Lampung yang memeluk agama Islam. Mereka



menganut agama Islam yang modern dan juga yang tradisional atau dalam organisasi keagamaan adalah Muhammadiyah dan NU.

Selaku warga menganut agama Islam memiliki hari-hari besar Islam, seperti; Idul Fitri, Idul Adha, puasa bulan Ramadhan dan Maulid Nabi Muhammad Saw. Hari-hari besar tersebut diperingati setiap tahun. Pada saat warga Lampung merayakan Idul Fitri, Suku Bali menghormati Suku Lampung. Mereka saling berkunjung dan saling meminta maaf. Bahkan warga Bali tidak melakukan aktivitas ekonomi seperti hari-hari sebelumnya. Mereka turut mendatangi rumah-rumah warga Muslim dan bersalam-salaman.

Sebulan sebelumnya warga Lampung melaksanakan puasa di Bulan Ramadhan, selama itu juga, warung-warung makan suku Bali tetap buka namun diberi tirai penutup agar tidak mengganggu ibadah warga Muslim Lampung. Selain itu, aktivitas yang dianggap mengganggu seperti perbengkelan akan dibuka setengah hari saja. Anak-anak yang bermain atau melintas di perkampungan Suku Lampung juga dinasihati agar tidak mengeluarkan suara yang keras baik siang ataupun malam hari. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk menghargai umat Islam yang sedang berpuasa di Bulan Ramadhan.

Demikian sebaliknya saat Suku Bali melaksanakan Hari Nyepi, warga Lampung tidak membuat kekacauan bahkan warga cenderung menghentikan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas ekonomi. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu warga Bali. Kalaupun ada di antara warga Lampung yang tidak melewati jalan-jalan pemukiman warga Bali dengan menggunakan kendaraan, warga Lampung cenderung mematikan mesin saat melintasi pemukiman warga Bali. Tanpa terkecuali juga mereka mengobrol atau berkomunikasi sangat dibatasi.

Menghargai dalam melaksanakan ibadah berdasarkan keyakinan ini sudah berlangsung sejak mereka bermukim di Desa Balinuraga selaku warga pendatang atau warga transmigrasi. Selama itu juga tidak ada pertentangan terkait dengan praktik-praktik keagamaan dan praktik



sosial budaya. Relasi sosial di antara kedua suku tersebut adalah saling menghargai dengan cara menjaga keamanan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk juga dalam melakukan praktik sosial keagamaan. Selain itu, kedua suku tersebut saling menjaga tempat-tempat ibadah seperti pura bagi warga Bali dan masjid atau mushala bagi warga Lampung. Hal ini dapat terlihat dengan adanya bangunan masjid bersebelahan dengan bangunan masjid di Desa Balinuraga karena di Desa Balinuraga adanya warga yang menganut agama Islam.

Kehidupan kedua suku tersebut berjalan normal. Sebagian besar warga Suku Bali dan Suku Lampung adalah bertani, mereka mengelola lahan pertanian dengan rajin dan tekun. Penghasilan dari bertani tersebut telah mengantarkan mereka menjadi warga yang mampu bertahan hidup bahkan menjadikan keduanya memiliki tingkat kehidupan yang makmur dengan indikasi setiap keluarga mampu memiliki rumah yang layak huni dan dilengkapi dengan berbagai alat-alat rumah tangga yang serba elektronik. Selain itu kepemilikan kendaraan baik kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat tidak bisa dipisahkan karena alat-alat transportasi tersebut memperlancar kegiatan ekonomi mereka.

Namun, tampaknya kemakmuran yang diperoleh Suku Bali, tidak berbanding lurus dengan peningkatan moral pada generasi ketiga Suku Bali, nilai-nilai kerukunan antara umat beragama dan kedamaian antarsuku telah bergeser. Hal ini disebabkan karena anak muda Bali telah mengenal kehidupan yang jauh lebih mapan dibandingkan pada era nenek moyang mereka terdahulu. Mereka memiliki fasilitas yang telah disediakan oleh orang tua dan telah memiliki pergaulan yang luas namun sedikit monitoring dari orang tua, sehingga perilaku anak muda Suku Bali terkesan bebas. Kebebasan perilaku tersebut ditujukan kepada warga Suku Lampung.

Karena itu, perilaku anak muda Bali sering kali menimbulkan ketidaknyamanan Suku Lampung. Gangguan-gangguan kecil terutama



dalam hal menjaga pergaulan hubungan antara muda dan mudi sulit dikendalikan oleh anak muda Suku Bali. Bahkan karena ulah anak muda tersebut, Suku Lampung sering kali tidak membuat perlawanan karena Suku Lampung memaklumi bahwa perilaku anak muda Suku Bali tersebut adalah perilaku anak yang baru kaya sehingga memiliki kekuasaan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pertentangan-pertentangan tersebut tampaknya semakin besar sehingga terjadi konflik yang bersifat anarkis yang mencapai puncaknya pada tahun 2012.

C. Awal Mula Terjadi Relasi Sosial yang Disosiatif

Perilaku anak muda Suku Bali sering kali mengganggu kenyamanan hidup Suku Lampung. Apabila dilacak kronologisnya, konflik yang terjadi pada tahun 2012 tersebut bukanlah konflik yang pertama kali yang dilakukan oleh Suku Bali, karena jauh sebelumnya sudah terjadi konflik dengan warga Lampung. Menurut Laporan Kenbangpol, 2012 konflik yang pernah terjadi dimulai sejak tahun 1982 saat itu pemuda Bali membakar 2 unit rumah karena berselisih paham antara pemuda Desa Sandaran dan Desa Balinuraga. Perselisihan itu diakhiri dengan cara berdamai. Kedua pemuda desa tersebut berjanji di depan aparat keamanan Lampung Selatan tidak akan mengulangi perselisihan lagi.

Pada tahun 2005 terjadi lagi pembakaran rumah penduduk Lampung oleh Suku Bali. Demikian juga pada tahun 2009 Suku Bali melakukan penyerangan di masjid di Kecamatan Ketapang. Tahun 2010 masih juga terjadi penyerangan rumah penduduk Suku Lampung yang mengakibatkan 1 orang tewas. Di tahun yang sama Suku Bali juga menghancurkan gardu ronda dan pangkalan ojek di perempatan Desa Gayam Kecamatan Penengahan. Tahun 2011 pembakaran rumah kembali dilakukan oleh Suku Bali karena balas dendam akibat perselisihan yang terjadi pada kedua suku tersebut.

Penyelesaian konflik-konflik dilakukan dengan kekeluargaan yang difasilitasi oleh pihak keamanan. Saat itu kondisi dalam keadaan



aman sehingga kedua suku tersebut dapat beraktivitas kembali. Sekalipun ada pertentangan-pertentangan kecil, Suku Lampung tidak mempersoalkan dengan harapan agar tidak terjadi konflik dari kedua suku tersebut. Bagi Suku Lampung pertentangan yang kecil tidak begitu dipersoalkan karena Suku Bali dianggap suku pendatang yang belum bisa beradaptasi.

Kesabaran Suku Lampung tampaknya tidak bisa lagi diredam karena perilaku anak muda Suku Bali telah membawa tragedi konflik antara kedua suku telah terjadi, sehingga tindakan anarkis telah merugikan baik material maupun nonmaterial. Kronologis terjadinya konflik tersebut adalah seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Anak Muda Bali Menggoda Anak Putri Lampung

Salah satu aktivitas yang rutin dilakukan oleh warga di Lampung Selatan baik orang tua, anak-anak maupun remaja adalah keluar rumah untuk mencari kebutuhan sehari-hari ke pusat-pusat perbelanjaan. Pusat-pusat perbelanjaan tersebut yang letaknya di Kabupaten Lampung Selatan yang terletak di Kalianda. Di sana terdapat toko-toko dan pusat-pusat perbelanjaan baik yang tradisional maupun yang modern yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Tempat-tempat itu juga sekaligus menjadi tempat pertemuan antarwarga yang sesama ingin memenuhi kebutuhannya. Warga tidak kenal waktu kapan mereka akan mengunjungi tempat-tempat tersebut, selama tempat-tempat perbelanjaan masih dibuka. Sehubungan dengan itu, pada hari-hari libur maka tempat perbelanjaan ramai dikunjungi warga.

Sama dengan warga lainnya, remaja putri yang berusia 17 tahun bernama SR yang berasal dari Desa Agom yang bersuku Lampung ini juga hendak mencari kebutuhannya ke pusat perbelanjaan tersebut. Dengan menggunakan sepeda motor SR membawa salah seorang teman karibnya bernama NB mereka melintas di jalan Desa Agom yang tidak ada hambatan. Sesekali kedua sahabat tersebut mengobrol seadanya dan sese kali dalam perjalanan tersebut mereka menegur orang-orang



yang mereka lewati karena mereka mengenal. Dengan mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan yang sedang berkisar antara 40 km per jam mereka telah sampai ke tempat tujuan.

Setelah memperoleh keperluan yang dibutuhkan, maka kedua remaja putri tersebut bergegas pulang. Di jalan yang dilalui tepatnya di jalan Desa Sidoarjo tampak dari spion motor, ada dua orang pemuda mengikuti perjalanan mereka. Serentak SR dan NB merasa takut, terlebih lagi jalan yang mereka lalui itu sepi tanpa ada orang yang melintas. Rasa khawatir dua anak gadis tersebut tidak dapat disembunyikan lagi manakala mereka berupaya mempercepat kendaraan. Namun seakan tidak mau kalah, pemuda Bali lebih mempercepat kendaraan motor yang mereka tumpangi sehingga jarak keduanya sudah berdampingan.

Melihat kejadian itu, kedua gadis tersebut semakin ketakutan dan tidak dapat dihindari bahwa motor yang mereka kendari jatuh tersungkur dengan keras, sehingga keduanya merasakan benturan yang keras di kedua lutut dan kaki mereka. Namun, rasa itu tidak mereka hiraukan karena fokus perhatian mereka masih tertuju pada dua pemuda yang mengikuti mereka sejak tadi.

Namun, tampaknya dua pemuda yang mengikuti mereka tersebut melihat kejadian itu, mereka langsung mendirikan sepeda motor yang jatuh dan berupaya untuk membantu sang pengendara. Tanpa berpikir panjang lagi pemuda tersebut berupaya membantu membangunkan SR dan NB dengan cara memegang tubuh kedua koraban yang tersungkur ke tanah.

Saat kejadian tidak ada dialog sama sekali di antara kedua belah pihak. SR dan NB terlihat luka memar di bagian lutut dan siku tangan. Keduanya meringis kesakitan tanpa menghiraukan lagi perilaku pemuda Bali yang mendekati mereka bahkan menolong mereka dalam kejadian tersebut. Nyaris kedua belah pihak panik namun masih dalam keadaan terkontrol karena pemuda Bali konsentrasi membantu kedua



remaja Lampung yang jatuh akibat remaja Bali mengikuti mereka dan menggoda mereka dari belakang.

Pemuda Bali yang menolong tersebut, tidak ada inisiatif untuk mengantarkan ke rumah orang tua atau ke rumah sakit untuk memperoleh pertolongan pertama karena saat itu pemuda tidak ada pikiran sampai sejauh itu. Yang ada adalah hanya untuk menyelamatkan korban yang saat itu yang pada saat kejadian telah luka akibat jatuh tersungkur. Belum lagi kerusakan motor yang yang diderita oleh remaja putri. Hal-hal ini yang merusak konsentrasi pemuda Bali saat itu.

Hal yang sama juga yang terjadi pada putri yang menjadi korban saat itu tidak ada keinginan untuk minta diantar pulang ke rumah atau minta diantar ke rumah sakit, karena saat itu yang ada adalah keinginan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat sehingga tidak ada persoalan dalam hal kecelakaan ini.

2. Atas Dasar Pengaduan dari Pihak Lain

Di jalan tampak lalu lalang warga yang hendak bepergian. Seorang laki-laki (AD) melihat kejadian kecelakaan yang menimpa putri Lampung. Dengan cekatan laki-laki tersebut turun dari motornya dan membantu korban yang jatuh. Tampaknya laki-laki separuh baya itu mengenal putra Bali dan putri Lampung. Dengan demikian, dia tidak memihak siapa-siapa yang ada dalam pikirannya adalah remaja putri tersebut harus diberi bantuan secepatnya karena remaja putri tersebut luka yang cukup parah, sehingga harus mendapat pertolongan secara medis dalam waktu yang cepat.

Laki-laki itu, mengantarkan remaja putra dan remaja putri ini ketempat orang tua masing-masing. Saat menyerahkan pemuda tersebut kepada orang tua dan mengatakan bahwa pemuda tersebut telah membuat jatuh anak putri Desa Agom. Mendengar pernyataan tersebut orang tua langsung menghardik anaknya seraya berkata:



ini anak tidak bisa melihat motor nganggur pasti sudah dipakai, gak tahu efeknya seperti apa.

Ungkapan tersebut didengar oleh orang yang mengantarkan anaknya dan orang tersebut langsung meninggalkan rumah. Tampak dari kejauhan dia mendengar orang tua pemuda tersebut mengucapkan terima kasih atas bantuan kepada anaknya karena sudah diantarkan ke rumah dan memberikan informasi terkait kejadian yang dialami oleh anaknya.

Setelah seorang laki-laki penolong tadi pulang ke Desa Agom langsung mendengar bahwa anak perempuan yang menjadi korban tadi mengadu sendiri dengan orang tuanya seraya meringis menahan sakit lukanya. Tiba-tiba saja laki-laki yang memberikan pertolongan tadi mengatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh putri remaja tersebut adalah benar adanya.

Mendengar pengaduan tersebut dan diberikan kesaksian oleh laki-laki yang memberikan pertolongan maka orang tua korban bingung dan geram melihat kejadian itu. Terlebih lagi tidak ada pihak yang menabrak memberikan pertolongan kepada anaknya. Hal tersebut diketahui oleh kepala Desa Agom dan juga pihak kepolisian. Saat itu kedua belah pihak memberikan saran kepada orang tuanya untuk membawa remaja tersebut berobat ke rumah sakit Abdul Muluk agar dicek seluruh kondisi tubuh remaja tersebut.

Pihak orang tua menyetujui usulan oleh kedua aparat tersebut. Kedua orang tua dan anak laki-lakinya menyiapkan seluruh perlengkapan untuk menuju rumah sakit. Namun, sebelum ke rumah sakit orang tua meminta pertolongan pertama kepada bidan desa untuk mengobati anaknya meskipun tidak intensif.

Tanpa pikir panjang lagi pihak keluarga pergi ke Bandar Lampung untuk memeriksakan korban tersebut ke rumah sakit milik pemerintah, yang memiliki sarana medis dan tenaga medis yang lengkap. Di rumah sakit ini juga pasien menerima rujukan dari



berbagai kabupaten. Dengan demikian, tindakan untuk mendatangi pihak rumah sakit untuk mengetahui keadaan korban adalah tindakan yang tepat agar segera tertangani dengan cepat dan tepat, sehingga korban dapat ditolong.

Panik dan khawatir adalah perasaan yang dialami oleh pihak keluarga, sehingga tidak ada pesan yang ditinggalkan oleh keluarga korban kepada tetangga selain hanya menitipkan rumah. Saat itu mereka hanya berharap bahwa anak putri mereka sehat dan tidak mengalami luka dalam yang parah. Saat itu keluarga membawa korban dengan perlengkapan pribadi secukupnya serta administrasi dibawa ke rumah sakit dengan mengendarai kendaraan roda empat menuju ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit korban didaftarkan melalui pendaftaran *emergency* sehingga pasien memperoleh bantuan dengan cepat oleh pihak medis termasuk juga dalam memperoleh ruangan untuk opname.

3. Atas Nama Kepala Desa Suku Agom

Keinginan untuk meringankan beban korban menjadi tujuan utama para warga suku Lampung. Hal ini diwujudkan dalam tindakan untuk saling membantu antara sesama mereka. Pada saat keluarga korban ke rumah sakit, maka kepala Desa Agom dan tetangga mendatangi rumah putra Bali di Desa Balinuraga. Alasan mereka hanya satu yaitu ingin membantu pihak korban untuk menyelesaikan masalah, karena selama ini mereka adalah saudara.

Tampaknya niat baik yang semua membantu pihak korban tidak mendapat respons yang baik dari pihak pelaku karena alih-alih mereka diterima dengan baik namun justru mereka mendapat celaan dari pihak pelaku. Kedua orang tua pelaku dan kepala Desa Agom tidak menyetujui bahwa pihak korban meminta uang untuk berobat ke rumah sakit dan kerusakan motor yang diperkirakan akan menghabiskan biaya 5 juta rupiah. Pihak korban mengatakan bahwa kesalahan bukan semata-mata pada mereka, namun juga pihak perempuan. Oleh karena itu,



besarnya biaya yang ditanggungkan kepada pihak korban hendaknya ditanggung secara bersamaan.

Dialog yang terjadi di rumah orang tua tertuduh pada Sabtu malam dan sudah mencapai 2 jam belum menunjukkan tanda-tanda kesepakatan karena keduanya tidak menemukan solusi karena masing-masing pihak masih mempertahankan keinginan masing-masing. Sampailah pada perhatian semua pihak pada statemen warga Balinugara mengatakan bahwa: “sudahlah orang Agom kok diperhatikan, itu kecil”. Tampaknya statemen tersebut memengaruhi pemikiran kepala Desa Balinurga, sehingga kepala desa mengatakan urusan sudah selesai dan silahkan meninggalkan tempat kami.

Saat itulah warga Dusun Agom meninggalkan rumah yang penuh dengan ornamen Bali yang terlihat elite di antara bangunan rumah-rumah suku Bali yang elite lainnya. Mereka pulang dengan membawa kekecewaan yang mendalam. Keinginan mereka tidak dipenuhi bahkan mereka juga memperoleh ejekan sehingga membuat mereka rendah diri karena mendapat ejekan dari warga Bali. Saat itu meskipun terluka warga Lampung tetap berbesar hati dengan cara meninggalkan rumah korban yang diikuti oleh Kepada Desa suku Agom dan beberapa warga Agom lainnya. Tidak ada rasa dendam saat itu, karena ada kesadaran bahwa menyelesaikan urusan seperti itu memang hal yang sulit, terlebih lagi harus berurusan dengan suku Bali yang selama ini memang terkesan eksklusif. Namun bagi orang Lampung urusan ini bukan tidak ada cara untuk menyelesaikannya hanya mereka masih mencari jalan yang tepat agar suku Bali mau berendah hati bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Sebab kalau kasus ini dibiarkan terus-menerus bukan tidak mustahil akan terjadi kasus-kasus berikutnya karena mereka menganggap bahwa orang Lampung tidak mempersoalkan hal-hal tersebut yang dianggap oleh mereka “*ngelunjak*” (menentang) yang berarti bahwa membiarkan kasus-kasus tersebut maka akan seterusnya terjadi karena orang Lampung akan selalu menerima perlakuan mereka.



4. Suku Lampung Memobilisasi Massa

Saat kedatangan Suku Lampung untuk mendiskusikan penyelesaian masalah, saat itu juga Suku Lampung disambut dengan tindakan yang anarkis oleh Suku Bali. Mereka ditembaki dengan menggunakan senjata angin dan saat itu juga Suku Lampung lari. Tindakan Suku Bali dianggap sangat tidak manusiawi. Suku Lampung datang untuk bermusyawarah namun mereka mendapat perlakuan seperti itu.

Lampung yang menjunjung tinggi harga diri dengan nilai filosofi suku Lampung yaitu *fill* merasa tindakan Suku Bali telah meruntuhkan harga diri orang Lampung. Sehubungan tindakan Suku Bali itu, maka salah seorang warga Suku Lampung dari Desa Agom menyebarkan pesan singkat melalui sms untuk meminta pertolongan karena harga diri mereka telah diinjak-injak Suku Bali. Selain itu Suku Lampung dengan membuka diri untuk semua lapisan masyarakat tanpa yang termuat dalam filosofi Lampung yaitu *nemui nyimah* (terbuka) dan *sakai sambaian* (saling tolong-menolong) tidak lagi dihargai oleh Suku Bali.

Pesan yang dikirimkan oleh seseorang dari Suku Agom menunjukkan bahwa harga diri orang Lampung telah diinjak-injak oleh Suku Bali. Dengan demikian, tidak ada jalan lain selain harus membalas dengan tindakan kekerasan. Namun bagi Suku Lampung perlawanan untuk menghadapi Suku Bali terlalu lemah, maka mereka membutuhkan bantuan dari pihak luar terutama yang Suku Lampung.

Secara singkat SMS tersebut telah menyebar ke berbagai pelosok tanah air di Lampung Selatan. Tanpa pikir panjang lagi Suku Lampung bersatu untuk membalas dendam pada Suku Bali yang sudah secara terang-terangan tidak menghargai Suku Lampung. Padahal Suku Bali adalah suku pendatang yang telah diberi keleluasaan hidup dan berkembang di *tanah sang bumi rua jurai* tersebut. Dengan demikian, secara cepat juga warga Lampung bersatu untuk membalas dendam kepada Suku Bali.



Penyerangan dilakukan secara bertahap dan dilakukan selama dua hari karena terhalang oleh pihak keamanan. Puncak konflik adalah Senin, 29 Oktober 2012. Namun penyerangan sudah dimulai pada Minggu tanggal 28 Oktober 2012 ribuan warga sudah berkumpul di sekitar Desa Agom. Saat itu kendaraan warga diparkir di pasar Patok di Kecamatan Way Panji lalu massa berjalan kaki yang melintasi Desa Sidorejo dan Desa Sidoreno Kecamatan Way Panji. Tepat jam 13.30 WIB, massa sampai di perbatasan Desa Sidorejo dengan Desa Balinuraga (Gambar 5.1).



Gambar 5.1 Massa Menuju ke Desa Balinuraga

Sumber: <http://www.lintasberita.web.id/kumpulan-foto-perang-suku-lampung-vs-bali/>

Massa yang dipimpin oleh tokoh adat Lampung, yaitu DR tersebut berencana akan menyerang Bali selama 2,5 jam yaitu penyerangan akan dilakukan tepat pada pukul 14.00 sampai 16.30 WIB, dengan tujuan utama yaitu menyerang Desa Balinuraga. Massa membawa senjata tajam seperti pisau golok, kampak bambu runcing bahkan senapan angin menuju Desa Balinuraga. Namun sebelum sampai ke Desa Balinuraga, massa yang jumlahnya ribuan orang maka sulit dikoordinasi, sehingga penyerangan dilakukan kepada siapa saja yang ditemui oleh massa saat itu. Dengan demikian, warga membumi

hanguskan rumah-rumah warga Desa Sidorejo dan membunuh siapa saja yang mereka temui saat itu. Perusakan aset-aset produksi, perusakan alat-alat perabot rumah tangga, perusakan tanaman dan kebun bibit karet, pemusnahan binatang ternak babi milik warga Desa Balinuraga dan penjarahan harta benda berharga. Pelampiasan sasaran konflik dengan perusakan dan pembakaran beralih ke fisik yang terlihat mata, karena pada saat penyerangan warga Desa Balinuraga sudah lari meninggalkan desa untuk menyelamatkan diri. Walaupun ada juga dari mereka warga Desa Balinuraga yang balik menyerang untuk mempertahankan harta bendanya pada saat warga Desa Agom dan pendukungnya menyerang.

Berdasarkan sasaran-sasaran konflik yang dilakukan oleh pihak warga Desa Agom dan massa pendukungnya, di mana sasaran konflik dengan tindakan perusakan dan pembakaran rumah-rumah maupun tempat ibadah merupakan sasaran yang paling banyak dilakukan. Pada saat penyerangan, mereka telah menyelamatkan diri yang ada tinggal rumah-rumah kosong dan tempat-tempat ibadah atau pura-pura. Akibatnya pelampiasan melalui tindakan perusakan dan pembakaran rumah-rumah dan tempat-tempat ibadah milik warga Bali Balinuraga dan Sidoreno, seperti yang dituturkan oleh TM dari Desa Balinuraga, bahwa:

“Terjadinya benturan konflik sampai ada korban jiwa, dari pihak kami korban 10 orang dan dari pihak lawan korban 4 orang. Pada saat kejadian konflik warga Desa Balinuraga pada berlarian menyelamatkan diri, sehingga rumah, tempat ibadah dibakar habis. Rata-rata rumah yang terbakar kurang lebih 460 unit dan tempat ibadah semua hancur berkeping-keping”.

Tindakan massa tidak bisa dihentikan. Mereka berhenti sendiri setelah massa mengetahui bahwa sudah banyak korban berjatuhan dan rumah-rumah yang dibakar serta tempat-tempat ibadah Bali dihancurkan. Atas instruksi tokoh adat maka tindakan itu akhirnya diakhiri dan massa kembali ke tempat parkir untuk mengambil



kendaraan mereka dan mereka satu per satu meninggalkan arena konflik.

5. Evakuasi Suku Bali dan Suku Lampung setelah Penyerangan Besar-besaran

Konflik antarsuku Bali dan Lampung yang berlangsung selama 2 hari itu telah memakan kerugian dan korban jiwa yang identifikasi oleh pihak keamanan adalah sebagai berikut. Tiga ratus tujuh puluh lima rumah hancur akibat dirusak dan dibakar, dan sekitar 103 rumah rusak ringan. Tidak diketahui secara pasti korban yang tewas 30 orang. Di samping itu, ada salah seorang warga Desa Agom yang terkena sabetan senjata tajam di bagian tangan kirinya di saat terlibat perkelahian.

Secara keseluruhan, kerusakan dan korban yang dialami oleh warga Desa Balinuraga, di antaranya yaitu: ada sebuah gedung SMP rusak sekitar 40%, sebuah gedung SD rusak sekitar 20%, pura agung tempat ibadah rusak parah, rumah warga yang rusak hangus dibakar berjumlah 375 unit, korban meninggal 10 orang dan puluhan orang luka-luka, satu kendaraan Isuzu Panther milik Polda Lampung dibakar, satu kendaraan Honda CRV dan Mitsubishi milik warga Balinuraga dibakar serta 5 kendaraan motor rusak. Di samping itu, terdapat 27 rumah warga Bali Desa Sidoreno Way Panji yang juga hangus dibakar. Demikianlah penjelasan dari petugas Kesbangpol Kalianda Lampung Selatan. Kesemuanya dengan total kerugian diperkirakan sekitar Rp23 miliar.

Total korban meninggal dalam bentrokan warga dari pihak Desa Agom, Kecamatan Kalianda dengan Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan menjadi 14 orang. Kepala Polres Lampung Selatan menyatakan 4 korban meninggal pada saat bentrokan hari Minggu (28/10/2012), yaitu merupakan korban yang berasal dari pihak Desa Agom, sedangkan 10 korban meninggal dan beberapa orang luka-luka tidak teridentifikasi pada saat bentrokan hari Senin (29/10/2012) merupakan korban yang berasal dari Desa Balinuraga.



Selanjutnya terdapat ribuan orang mengungsi pada saat konflik antarwarga di Lampung Selatan, yang menyebabkan penderitaan bagi mereka. Ada perasaan ketakutan akan serangan balasan, maka menyebabkan ribuan orang takut keluar rumah. Kabid Humas Polda Lampung menyatakan, ada sekitar 1108 orang diungsikan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling Bandar Lampung (Gambar 5.2).



Gambar 5.2 Warga Mengungsi di SPN Bandar Lampung

Sumber:<http://www.lintasberita.web.id/kumpulan-foto-perang-suku-lampung-vs-bali/>

Sejak hari Senin, ribuan warga Desa Agom terpaksa juga harus mengungsi untuk menghindari serangan balasan dari pihak warga Desa Balinuraga. Mereka mengungsi ke Mapolres Lampung Selatan. Para pengungsi tersebut di antaranya, yaitu kebanyakan perempuan, orangtua, dan anak-anak. Mereka berbondong-bondong membawa bungkusan pakaian, dengan raut muka yang menunjukkan rasa cemas, takut akan keselamatannya.

Setelah dilakukan evakuasi dan didata kerugian akibat konflik tersebut maka mengenai kehilangan harta benda pada kejadian konflik antarwarga Desa Agom, 11 motor, satu minibus, dan dua mobil jeep rusak berat. Selain itu, Desa Sudimulyo yang merupakan tetangga Desa Agom dan Balinuraga menjadi korban akibat insiden tersebut. Kerugian yang diderita oleh warga Desa Sidomulyo adalah sebanyak 48 rumah terbakar dan 33 rumah rusak berat (Benjamin, 2016).



Dari konflik tersebut dapat teridentifikasi bahwa aktor-aktor yang terlibat konflik adalah para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap perangkat desa dari kedua belah pihak. Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Lampung, Kapolres Lampung Selatan, Kapolsek dan jajarannya; TNI, LSM, Ormas, Satpol PP, Bupati dan Aparat Pemerintah Daerah, serta lembaga-lembaga keamanan lainnya, terutama dalam proses pengendalian terhadap situasi dan kondisi, serta dalam upaya penyelesaian konflik dan perdamaian (Gambar 5.3).



Gambar 5.3 Aparat Keamanan sedang Berjaga-jaga di Arena Konflik

Sumber: <http://www.lintasberita.web.id/kumpulan-foto-perang-suku-lampung-vs-bali/>



BAB 6

RELASI SOSIAL SUKU BALI DAN SUKU LAMPUNG PASCAKONFLIK

Bab ini mendeskripsikan relasi sosial dua suku yang konflik. Relasi sosial dimulai dengan terlebih dahulu menguraikan kedua suku tersebut berdamai dengan dimediasi oleh pihak luar. Uraian selanjutnya tentang relasi kedua suku setelah konflik selesai.

A. Suku Bali dan Suku Lampung Berdamai

Jumlah kerugian dan korban jiwa akibat konflik selama 2 hari tersebut membuat warga Suku Bali trauma. Mereka tidak menyangka dalam waktu singkat hubungan yang harmonis selama ini telah hilang. Kekecewaan terhadap sesama Suku Bali juga muncul. Penyesalan dirasakan oleh warga Bali. Bahkan mereka mengatakan bahwa tidak menyangka kalau Suku Lampung membalas dendam mengingat selama ini apa pun sikap dan tindakan Suku Bali, Suku Lampung tidak mempersoalkan karena selalu memegang teguh toleransi.

Namun, di lain pihak Suku Bali menyadari bahwa tindakan mereka memang sudah di luar batas kesabaran Suku Lampung. Saat itu mereka menyalahkan anak-anak muda Suku Bali yang memang dianggap tidak menghormati dengan Suku Lampung. Bahkan ada yang beranggapan

bahwa Suku Lampung baik karena mereka tidak diusir dari tempat mereka.

Saat itu, keinginan untuk berdamai juga sudah menguat, karena Suku Bali tidak ingin hidup mereka terus-menerus seperti itu. Mereka ingin kembali hidup berdampingan dengan suku Lampung. Begitu sebaliknya Suku Lampung juga tidak menyangka kalau konflik yang terjadi dalam waktu singkat itu akan begitu membahayakan kehidupan kedua suku tersebut. Sebenarnya Suku Lampung hanya ingin memberi pelajaran atas sikap Suku Bali selama ini yang dianggap kurang sopan dengan Suku Lampung. Namun yang menyerang itu bukan hanya warga dari Desa Agom maka tidak heran motif-motif penyerangan juga sudah beragama seperti penghancuran tempat ibadah dan membunuh ternak-ternak babi orang Bali, bahkan merusak tanaman bibit karet Suku Bali.

Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah memberikan simpati kepada para korban dengan memberikan bantuan seperti korban yang jatuh dari motor akibat ulah pemuda Bali diberi bantuan sebesar masing-masing Rp 2.500.000,- sedangkan korban rumah terbakar atau rusak sebanyak 438 rumah masing-masing Rp1.200.000,- , warga yang meninggal 9 (sembilan) orang warga Balinuraga dan 3 (tiga) warga Agom masing-masing Rp10.000.000,-.

Meskipun para korban memperoleh santunan, namun warga menyadari pahitnya kehidupan berkonflik maka kedua suku tersebut akan berdamai. Namun, tampaknya mereka dimediasi oleh pihak kepolisian yang juga dihadiri oleh tokoh adat Lampung dan dari tokoh-tokoh Bali serta Gubernur Bali dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mediasi itu disepakati bahwa konflik antarsuku tersebut diakhiri dengan cara damai (Gambar 6.1).





Gambar 6.1 Pembacaan Kesepakatan Damai

Sumber: <https://www.kompasiana.com/andiansyori/55198d47a333113d19b65960/kerusuhan-lampung-selatan-akhirnya-warga-asal-bali-diangkat-saudara>

Berikut adalah kesepakatan berdamai dari kedua belah pihak

1. Kedua belah pihak sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku di Lampung Selatan;
2. Sepakat tidak mengulangi tindakan-tindakan anarkisme yang mengatasnamakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
3. Perselisihan atau pertikaian dan perkelahian yang disebabkan permasalahan pribadi, kelompok, atau golongan agar diselesaikan secara langsung oleh orang tua, ketua kelompok, atau pimpinan golongan;
4. Apabila proses itu tidak berjalan semestinya, akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta aparat pemerintahan desa setempat;



5. Jika langkah itu tidak selesai, diserahkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kedua belah pihak bersedia melakukan pembinaan apabila ditemukan warga yang melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan permusuhan dan kerusuhan, dengan ancaman sanksi dikeluarkan dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
7. Sanksi pengusiran juga berlaku bagi Suku Lampung dan seluruh suku di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
8. Kedua belah pihak berjanji tidak akan menuntut dan melakukan tindakan hukum atas akibat bentrokan 27-29 Oktober 2012. Aparat kepolisian menghentikan seluruh proses hukum terkait dengan bentrokan itu;
9. Warga Suku Bali, khususnya yang berada di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, harus mampu hidup bersosialisasi dan hidup berdampingan dengan seluruh suku yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, terutama dengan masyarakat yang ada di perbatasan dengan Desa Balinuraga;
10. Kedua belah pihak berkewajiban mensosialisasikan isi perjanjian perdamaian ke lingkungan masing-masing (Arsip Desa Balinuraga-Desa Agom, 2012).

Pembacaan kesepakatan kedua suku dilakukan di Lapangan Desa Agom (Gambar 6.2). Setelah selesai dalam menyatakan ikrar tersebut, tanpa dikomando oleh pihak keamanan dan pihak aparat keamanan, kedua suku tersebut melakukan aksi berjabat tangan sebagai simbol perdamaian dan mempererat persaudaraan kembali.

Deklarasi perdamaian dibarengi dengan proses *kemuwarian* (angkat saudara) yang merupakan adat istiadat Lampung untuk menunjukkan persaudaraan. *Angkon muakhri* atau mengangkat bermakna bahwa Suku Lampung dan Suku Bali adalah status kekerabatannya adalah saudara laki-laki. Karena itu, sesama saudara laki-laki saling bahu membahu



dan menjadi tim yang kompak sehingga tidak terjadi perang saudara atau konflik.

Dalam adat Lampung *angkon muakhi* ini adalah cara untuk menambah saudara sekalipun itu diawali dengan konflik. Namun, bagi Suku Lampung sering kali dilakukan untuk mempererat persaudaraan. Selain itu, mengangkat saudara tersebut menunjukkan bahwa Suku Lampung bukanlah orang-orang yang sulit untuk diajak berdialog menuju perdamaian, tetapi justru Suku Lampung memiliki keterbukaan terhadap perbedaan sekalipun itu telah menjatuhkan harga diri mereka karena terjadi konflik.



Gambar 6.2 Lapangan Desa Agom

B. Relasi Sosial Suku Bali dan Suku Lampung setelah 6 Tahun Konflik

1. Relasi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Sejak kejadian konflik antarsuku Bali dan Lampung yang terjadi pada tahun 2012 yang lalu, kini kurang lebih sudah 6 tahun berlalu daerah ini tetap menjadi daerah pantauan pihak keamanan dan pemerintah setempat. Kerja sama ditingkatkan dalam bidang sosial dan ekonomi.



Mereka membentuk forum dialog untuk mempertemukan kembali kedua suku tersebut. Lembaga tersebut berawal dibentuk atas inisiasi dari pihak pemerintah setempat yakni upaya untuk mendamaikan kedua suku tersebut.

Inisiasi tersebut dibentuk oleh pemerintah karena ada anggapan bahwa kedua suku tersebut masih dalam keadaan trauma untuk melakukan hubungan kerja sama kembali karena konflik yang terjadi telah meluluhlantahkan kehidupan yang mengakibatkan hilangnya harta benda dan juga hilangnya sumber mata pencaharian bahkan terjadi kematian dari salah satu anggota keluarga mereka.

Meskipun rumah yang hancur karena hangus terbakar itu sudah dibangun kembali, namun warga masih belum bisa menghilangkan trauma tersebut. Bahkan ada salah satu korban yang membiarkan rumahnya hancur dan tidak dibangun kembali karena pemilik rumah masih sangat ketakutan untuk kembali bermukim di tempat semula.

Dampak dari trauma tersebut dapat teridentifikasi dengan adanya warga yang sekalipun telah mendapatkan dana untuk membangun kembali rumah, namun itu tidak dilakukan karena warga masih pembangunan rumah yang mendapat biaya untuk membangun kembali rumah namun tidak dilakukan karena warga sampai sekarang masih trauma. Meskipun demikian, ada warga yang sudah membangun kembali rumahnya, namun perasaan trauma masih terus membayangi kehidupannya, sehingga kehidupan warga sering kali tidak nyaman akibat terjadinya konflik yang anarkis tersebut (Gambar 6.3).

Atas dasar itu, mereka belum ada keinginan untuk bertatap muka kembali dengan suku Lampung dan Suku Bali. Sehubungan dengan itu, pertemuan itu difasilitasi oleh pihak luar dalam hal ini pemerintah. Namun demikian, pertemuan itu belum secara intens dilakukan karena kesibukan warga yang membuat mereka jarang untuk melakukan pertemuan rutin.





Gambar 6.3 Rumah Korban Konflik yang Belum di Bangun

Namun demikian, tidak ada keinginan Suku Lampung dan Suku Bali untuk terjadi konflik kembali, dengan apa pun alasannya. Karena itu, mereka masing-masing diri menahan diri sendiri dan menjauhi pergaulan dari kedua suku tersebut. Meskipun demikian, apabila ada undangan berupa kegiatan sosial seperti pernikahan, kematian dan aktivitas sosial berupa syukuran (yasinan) yang dilakukan oleh suku Lampung untuk mengungkap rasa syukur atas kelahiran anaknya. Dalam acara itu turut diundang pada tokoh adat Bali, kepala desa dan warga Bali. Kehadiran Suku Bali menunjukkan bahwa Suku Bali menghargai Suku Lampung dan sekaligus juga mengungkapkan bahwa mereka telah bersahabat kembali.

Demikian pula sebaliknya, ada upacara ogoh-ogoh yang dilakukan oleh suku Bali. Kepala desa, tokoh adat dan warga Lampung diundang dalam acara tersebut. Warga Lampung dalam acara tersebut mereka turut memeriahkan upacara adat Bali. Dalam pelaksanaannya warga Lampung tertib mengikuti setiap proses acara tersebut dan tidak meninggalkan tempat kalau tidak selesai. Sikap seperti itu menurut Suku Lampung acara cara mereka menghargai Suku Bali yang sedang mengundang mereka. Suku Lampung juga tidak menikmati makanan



yang dianggap halal oleh mereka dan tidak mengonsumsinya jika dianggap tidak halal.

Pascakonflik, warga Bali menjalankan praktik ibadah dengan aman dan nyaman. Dalam rangka menyambut hari Nyepi warga Bali menjalankan serangkaian praktik-praktik seperti melaksanakan upacara Malesti yang dipusatkan di Pura Ulun Sui (Gambar 6.4), yang dilanjutkan dengan kegiatan Tawur Agung atau bersih desa dan juga pawai Ogoh-Ogoh yang merupakan lambang kejahatan dunia. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan untuk menyambut hari Nyepi.

Dalam pelaksanaan acara tersebut, warga Lampung bersama-sama dengan aparat kepolisian melakukan penjagaan untuk keamanan dan kenyamanan warga Bali yang sedang melakukan upacara keagamaan yang dilakukan sekali dalam setahun. Meskipun acara tersebut dilakukan 3 hari berturut-turut sampai pada puncaknya hari Nyepi, namun tidak ada indikasi bahwa kedua suku tersebut masih menyimpan dendam.

Warga Bali tidak lagi menggunakan alat pengeras suara manakala melintasi jalan di Desa Agom saat menuju ke laut untuk melakukan upacara bersih diri di laut dalam rangka menyambut hari raya nyepi. Barisan panjang dari para suku Bali membuat warga terganggu karena jalan digunakan untuk mereka, sehingga mengganggu lalu lintas suku Lampung yang akan menggunakan jalan tersebut. Terlebih lagi dengan menggunakan alat pengeras suara, tampaknya suku Lampung sangat terganggu karena suara yang keras sehingga memekakan telinga. Seperti yang terungkap dari petikan wawancara berikut ini:

“...setelah terjadi konflik banyak yang berubah dari perilakunya suku Bali. Misal saja, kala dulu mereka akan ke laut untuk sembahyang selain barisan yang panjang sehingga memakan jalan, lalu alat pengeras suara juga digunakan. Kala sekarang mereka tidak lagi menggunakan alat pengeras suara kalau lewat di sini...” (wawancara dengan RS warga Desa Agom, Lampung Selatan).





Gambar 6.4 Upacara Malesti di Pura Ulun Sui Desa Balinuraga

Sumber: <http://www.lampost.co/berita-ribuan-umat-hindu-balinuraga-ritual-melasti>

Dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh kedua suku tersebut, masing-masing pihak tidak menyinggung persoalan konflik yang pernah terjadi. Mereka lebih memfokuskan pada pembicaraan



yang bersifat umum, seperti upaya untuk membangun desa atau juga membicarakan persoalan akan dibangunnya jalan tol di lingkungan mereka. Obrolan-obrolan yang bersifat umum tersebut adalah cara mereka saling menghargai dan berupaya untuk melupakan kejadian-kejadian konflik yang pernah mereka alami. Sekalipun terdapat warga yang sampai saat ini belum mendirikan rumah akibat hangus terbakar seperti yang dialami oleh Pak Made, namun fokus pembicaraan tidak menyinggung kondisi Pak Made. Dengan demikian, relasi sosial kedua suku tersebut dalam berjalan secara harmonis.

2. Menguatnya Solidaritas

Setelah terjadi konflik antarsuku, maka daerah ini adalah daerah dinyatakan oleh pemerintah daerah yang rawan konflik, sehingga kedua daerah ini menjadi pusat perhatian baik dari pemerintah maupun dari berbagai warga yang ada di Lampung. Bersamaan dengan itu, maka daerah ini menjadi daerah yang menjadi tempat pemberian bantuan baik mulai dari terjadinya konflik sampai pada setelah terjadi konflik. Bentuk bantuan itu tidak saja datang dari mereka sendiri tetapi juga dari pihak luar.

Bantuan bedah rumah dari pemerintah diterima oleh Suku Lampung. beberapa Suku Lampung mendapatkan bantuan bedah rumah karena ada rumah yang tidak layak huni karena kurang memenuhi syarat-syarat rumah higienis. Demikian juga bantuan berupa kebutuhan pokok, pascakonflik sering kali tetangga desa memberikan bantuan sembako kepada Suku Bali dan Suku Lampung.

Demikian juga dengan relasi sosial di antara Suku Lampung dan Suku Bali semakin menguat setelah terjadi konflik. Tidak saja antarsuku tetapi juga sesama suku. Suku Lampung memiliki kelembagaan secara nasional setelah terjadi konflik antarsuku. Lembaga lokal tersebut diberi nama *rembuk pekon*. Nama ini diambil dari bahasa Lampung yang artinya adalah musyawarah desa. Lembaga sosial ini dibentuk



secara serentak oleh warga Lampung di Kalianda yang keanggotaannya adalah seluruh suku yang bermukim Lampung. Fungsi dari lembaga ini adalah media komunikasi agar aspirasi anggota dapat ditampung dan didialogkan, sehingga konflik dapat diminimalisir akibat ada kesalahan komunikasi.

Rembuk pekon merupakan media untuk memperkuat perdamaian, yang anggotanya adalah seluruh warga yang bermukim di Lampung. Lembaga lokal ini tidak ada tempat khusus namun apabila diperlukan maka lembaga ini akan berfungsi dan siap melayani kepentingan-kepentingan anggotanya. Bahkan lembaga ini menjadi penghubung antara masyarakat dan pemimpin yang ada di pemerintahan Lampung.

Tidak berbeda jauh dengan Suku Bali. Setelah konflik Suku Bali mulai giat memanfaatkan banjar untuk pertemuan para warganya. Dalam pertemuan itu mereka membahas banyak hal baik sosial keagamaan dan juga politik. Pertemuan antara sesama Suku Bali ini dijadikan media mediasi dan media memonitoring sesama Suku Bali mengingat tindakan-tindakan mereka sering kali berbenturan dengan Suku Lampung.

Setelah kedua suku tersebut berdamai, Suku Bali mengakui bahwa Lampung adalah tempat mereka hidup dan sekaligus merupakan identitas mereka. Seperti yang diungkap oleh Pak Putu bahwa saat dia pulang ke Bali, maka identitas dia bukan Bali, melainkan Lampung, seperti yang diungkapkan dalam wawancara di bawah ini

.....Sebenarnya Lampung adalah tempat kami Suku Bali dan sekaligus identitas kami, saat kami pulang ke Bali, maka kami dianggap bukan orang Bali melainkan orang Lampung.....”

Statemen tersebut diakui oleh para informan lainnya bahwa saat mereka pulang ke Bali, mereka dianggap orang Lampung. Dengan demikian, keterikatan mereka dengan tanah Lampung sangat kuat karena di tanah Lampung mereka mendapatkan penghidupan dan



melahirkan generasi-generasi baru. Karena itu, mereka sangat menyesali adanya insiden konflik tersebut dan berharap tidak lagi terjadi konflik di antara mereka.

3. Implementasi Proyek Jalan Tol oleh Pemerintah Pusat di Lampung Selatan

Upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyat di seluruh nusantara ini tampak pada upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur berupa jalan tol. Upaya tersebut untuk mempercepat dan mempermudah akses dari satu kota ke kota lainnya, bahkan dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Dengan kemudahan dan kecepatan akses diharapkan akan menunjang percepatan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2017 pembangunan jalan tol telah terealisasi 332 km. Sedangkan pada tahun 2019 sepanjang 1.852 kilometer. Keseluruhan ruas jalan tol yang dibangun di berbagai daerah di Republik Indonesia mencapai 1.089 kilometer.

Lampung Selatan menjadi bagian dari proyek tersebut. Jalan yang menghubungkan Bakuheni ke Sumatera Selatan menjadi tujuan utama dibangun jalan tol. Menurut Peraturan Presiden No. 100 Tahun 2014 yang diperbaharui melalui Perpres No. 117 Tahun 2015 pemerintah membangun jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 2.770 kilometer.

Pembangunan Jalan tol trans Sumatera meliputi Bakauheni-Terbangi Besar sepanjang 140,938 km dan Terbangi Besar-Pematang Panggang sepanjang 112,185 km, sehingga totalnya 253,123 km. Sampai pada April tahun 2017, ganti atas lahan-lahan warga yang kena proyek jalan tol telah dibayar oleh pemerintah sebanyak 8.292 bidang dari 10.584 bidang senilai Rp3,49 triliun dari 4,46 triliun dari total yang harus dibayarkan oleh pemerintah.

Menurut kementerian BUMN yang dikutip oleh *okezone* tgl 20 September 2018 tujuan dibangun Jalan Tol Trans Sumatera ada enam alasan: *pertama*, Pulau Sumatera kaya akan potensi alam seperti



karet, sawit, kopi, minyak, bumi, batu bara, serta gas bumi; *kedua*, menjadi kontributor PDB kedua terbesar setelah Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 22,21% pada tahun 2015; *ketiga*, menjadi penopang pertumbuhan PDB dalam jangka menengah ketika Pulau Jawa mengalami *declining period*; *keempat*, mempersingkat waktu tempuh; *kelima*, dapat terakses pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan *supply chain systems*; *keenam*, peningkatan nilai properti dan potensi pengembangan perumahan.

Dengan demikian, menurut Kementerian BUMN dibangunnya Jalan Tol Trans Sumatera biaya logistik dapat ditekan sehingga produk-produk unggulan hasil bumi dan sumber daya di Sumatera dapat didistribusikan dengan cepat dan biaya terjangkau. Selain itu, saat beroperasinya ruas-ruas Jalan Tol Trans Sumatera diperkirakan akan membuka lapangan pekerjaan sehingga pengangguran akan berkurang. Demikian juga dengan penerimaan negara dalam bentuk pajak dan juga meningkatkan daya saing produk-produk unggulan melalui rest area di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera akan diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar ruang tol.

Tidak ada protes dari warga terkait pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut (Gambar 6.5). Hal ini dikarenakan warga Desa Agom memperoleh ganti untung sehingga setiap KK yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol memberikan lahannya untuk dibangun jalan tol. Tampaknya bukan karena ada ganti untung saja yang menyebabkan warga membebaskan lahan untuk pembangunan jalan tol, tetapi juga karena ada keinginan agar mudah terhubung ke pusat-pusat perkotaan yang kehidupannya jauh lebih maju dibandingkan dengan penduduk setempat yang rawan terjadi konflik. Dengan demikian, daerah mereka akan lebih maju.





Gambar 6.5 Jalan Tol di Depan Desa Agom

Selain itu, karakter warga Desa Agom yang homogen adalah Suku Lampung sangat terbuka dengan perubahan, baik itu perubahan fisik ataupun sosial lainnya. Sifat yang kompromi ini telah tertanam dalam jiwa masing-masing Suku Lampung karena menganut falsafah hidup *fiil pesenggiri* yang dalam praktiknya dapat menerima bentuk-bentuk perubahan dengan cepat dan tidak ada curiga terhadap perubahan itu sendiri. Sifat yang akomodatif ini yang kemudian memudahkan para pengambil kebijakan untuk memperoleh pembebasan lahan di sekitar Desa Agom.

Selaku daerah yang rawan terjadi konflik maka daerah tersebut menjadi sorotan oleh berbagai pihak seperti pemerintah daerah dan juga pihak-pihak terkait lainnya, maka daerah ini juga menjadi fokus perhatian untuk kesejahteraan. Upaya itu dilakukan baik langsung ataupun tidak langsung. Bantuan secara langsung diberikan pada saat konflik tersebut telah selesai seperti bantuan pembangunan rumah bagi korban bencana yang rumahnya tidak bisa digunakan lagi karena

dibakar oleh massa. Selain itu, bantuan pengamanan berupa monitoring dari aparat keamanan masih diberlakukan walaupun tidak ketat seperti penjagaan pada saat terjadi konflik dan di awal-awal setelah selesainya konflik.

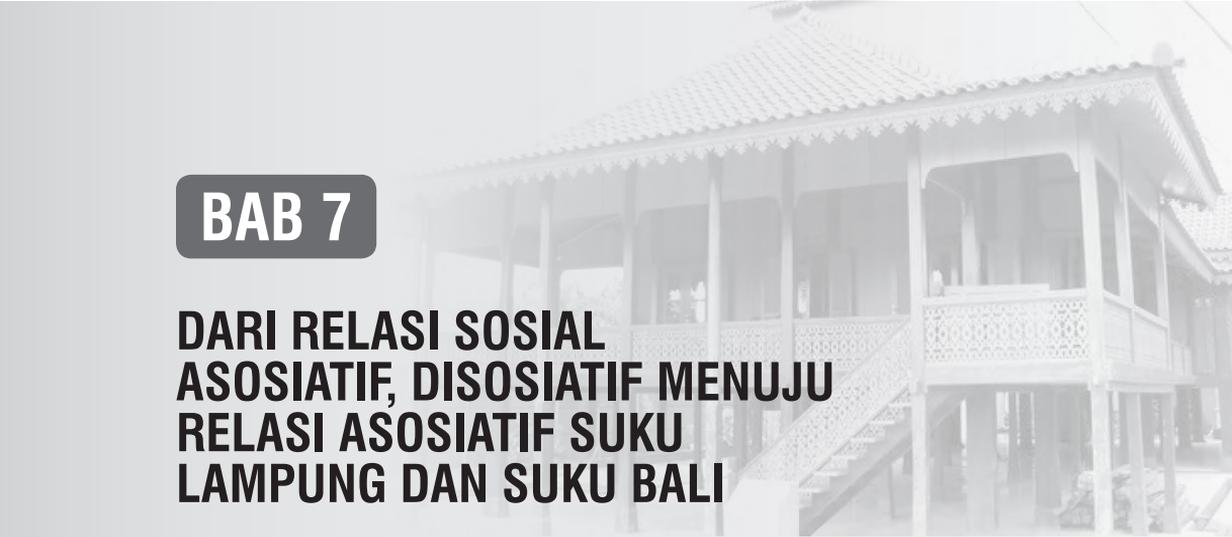
Adanya pembangunan tol bukan semata-mata diberikan kepada mereka karena daerah tersebut rawan konflik, melainkan jalan tol tersebut telah lama dirancang dan daerah tersebut memang menjadi daerah yang akan dibangun jalan tol. Namun beroperasinya jalan tol tersebut bertepatan dengan selesainya konflik. Dengan beroperasinya jalan tol menimbulkan berbagai perubahan baik dari segi fisik maupun sosial bagi kedua suku yang bertikai khususnya dan masyarakat Lampung Selatan umumnya.

Sejak dibangunnya infrastruktur berupa jalan tol di Desa Agom, kehidupan di desa ini mengalami perubahan yang signifikan. Desa yang dulunya adalah desa lama yang nyaris tidak ada kegiatan lain selain aktivitas perekonomian, namun setelah ada jalan tol, warga memiliki pekerjaan baru yakni mendirikan toko-toko dan warung-warung. Dengan perekonomian tersebut maka kehidupan suku Lampung tampak sekali mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan.

Sejak ada jalan tol di Desa Agom, maka Suku Bali sering berbelanja kebutuhan sehari-hari di toko Suku Lampung, sehingga relasi sosial yang berupa kerja sama terjadi pada saat transaksi jual beli. Hal ini disebabkan karena saat transaksi secara tidak langsung mereka sudah bertegur sapa dengan ramah, bahkan tidak jarang mereka menitip salam dengan sesama warga yang dikenal. Tidak jarang pula, pemilik warung menyampaikan informasi bahwa ada warga Bali yang kemarin duduk dan ngobrol lama di sini. Ungkapan itu disampaikan secara langsung kepada warga Bali yang sedang melakukan transaksi, secara otomatis pembeli juga merasa bukan saja pembeli tetapi lebih pada pengakuan kepada persaudaraan yang kembali terjalin setelah konflik.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



BAB 7

DARI RELASI SOSIAL ASOSIATIF, DISOSIATIF MENUJU RELASI ASOSIATIF SUKU LAMPUNG DAN SUKU BALI

A. Relasi Sosial Asosiatif Suku Bali dan Suku Lampung

Masyarakat multikultur adalah masyarakat yang memiliki berbagai karakter yang berbeda dan bermukim di suatu wilayah tertentu dengan (Kymlicka, 2001). Dalam kehidupan sosial mereka diharapkan oleh berbagai perbedaan seperti agama dan budaya. Dalam perbedaan itu, mereka dihadapkan oleh setidaknya dua relasi yaitu relasi yang bersifat kerja sama yang pada akhirnya masyarakat merasa menjadi bagian di dalamnya dan merasakan menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Relasi ini sering kali menjadi relasi yang diharapkan sekalipun masyarakatnya berbeda dari berbagai kultur dan agama. Karena itu, relasi seperti ini menjadi relasi sosial yang menjadi tujuan utama karena masing-masing anggota masyarakat merasa nyaman.

Masyarakat multikultur dapat dilihat dalam kasus masyarakat transmigrasi dan masyarakat pribumi. Kasus tersebut ini sering kali mengalami pertentangan meskipun kasus pertentangan tidak terjadi secara tiba-tiba seperti penduduk yang ditransmigrasikan ke Pulau Sumatera khususnya ke Lampung. Mereka menyatu dengan penduduk

Lampung sebagai penduduk pribumi. Bahkan kerja sama seperti dalam kegiatan ekonomi dan sosial berlangsung dari tahun ke tahun.

Hasil kerja keras penduduk pendatang membuahkan hasil yang maksimal. Itulah sebabnya penduduk Bali dilihat dari kesejahteraan jauh lebih sejahtera dibandingkan Suku Lampung. Sungguhpun demikian itu tidak menutup kemungkinan bahwa relasi sosial tetap terjalin dengan baik. Ketergantungan Suku Bali dalam hal daun kelapa muda yang disediakan oleh Suku Lampung. Ketergantungan ini menjadi media untuk relasi sosial yang sifat kerja samanya akan terjalin.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap individu menjadi kebergantung dengan orang lain dalam aktivitas-aktivitas sosial dan ekonominya. Hal ini terungkap dalam penelitian bahwa penduduk perkotaan memiliki relasi sosial dengan pedagang (Prakasita dan Harioanto, 2017) dan juga terungkap dalam penelitian Hafid (2016) bahwa masyarakat yang multikultur dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa harus adanya konflik. Lebih jauh Hafid (2016) mengatakan bahwa penduduk pribumi sering kali jauh apabila dibandingkan kesejahteraannya, namun mereka tidak ada kecemburuan sosial karena masing-masing suku menyadari dengan cara saling menghormati.

Demikian halnya dengan Suku Bali sebagai suku pendatang dapat hidup harmonis dengan Suku Lampung sebagai suku pribumi. Keharmonisan tersebut tidak lepas dari keinginan Suku Lampung untuk saling berbagi dengan sesama dan selalu menghargai yang termuat di dalam nilai falsafah yaitu *fiil pesenggiri* yang mencakup *bejulek beadek*, *nemui nyimah*, *sakai sambayan* dan *nengah nyampur*. Menurut Irianto dan Margatha (2011); Harirama (2004); Sinaga (2014) falsafah ini adalah untuk tujuan integrasi dari perpecahan multikultur di Lampung.

Falsafah *fiil peseinggri* tersebut Suku Lampung yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks ini penerimaan mereka pada Suku Bali yang datang dengan berbagai atributnya. Namun atribut yang dibawa oleh Suku Bali yang sekaligus menunjukkan identitas Suku Bali bukan menjadi prsoalan bagi suku Lampung.



Mereka lebih cenderung menghargai karena bagi mereka adalah suku Bali adalah seorang tamu yang harus banyak dimaklumi karena berbeda karakter.

Demikian juga Suku Bali, mereka memiliki dasar perdamaian yang berasal dari kitab dan kesusastraan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalin relasi sosial antarsesama. Bagi mereka semua adalah saudara memiliki makna bahwa Suku Lampung adalah saudara mereka terlebih lagi mereka tinggal di Lampung, maka identitas mereka adalah Lampung bukan Bali.

Nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh kedua suku tersebut yang oleh Hidayati (2016) disebut dengan kearifan lokal, yang dijadikan modal sosial untuk menyelesaikan konflik dengan cara menggunakan kearifan lokal. Menurut Hidayati (2016) kearifan lokal adalah tatanan yang berupa pengetahuan, norma, peraturan dan keterampilan yang diwariskan secara turun-menurun di suatu masyarakat. Itulah sebabnya sekalipun kearifan lokal bersifat tradisional namun keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sekalipun masyarakat modern, karena kearifan lokal dapat menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial budaya masyarakat.

Bagi warga Lampung kearifan lokal seperti *fiil pengenggiri* dijadikan cara untuk menyelesaikan konflik, sekalipun mereka menggunakan proses mediasi namun pada akhirnya warga Desa Agom menggunakan *angkon muakhri* atau mengangkat Suku Bali menjadi saudara kandung.

Sehubungan dengan itu, maka pertentangan-pertentangan yang dilakukan oleh Suku Bali terhadap Suku Lampung persoalan tersebut tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi Suku Lampung, karena sikap untuk menghargai perbedaan suku Bali menjadi tujuan utama warga Lampung.

Relasi sosial yang terjalin dengan harmonis ini berlangsung sampai bertahun-tahun. Hal ini diindikasikan dengan adanya penghormatan



Suku Bali saat umat Islam menjalankan ibadah puasa. Mereka tidak membuka peluang-peluang untuk mengganggu. Demikian juga halnya dengan kegiatan sosial yang Suku Bali dan Lampung sangat toleransi dengan aktivitas-aktivitas sosial. Hal yang sama juga dilakukan oleh suku Lampung. Saat suku Bali menjalankan hari Raya Nyepi, Suku Lampung juga menghargai perayaan tersebut. Sikap toleransi tersebut menurut Hafid (2016) menyebabkan relasi yang positif karena mereka mampu menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, seiringnya perubahan yang menunjukkan bahwa Suku Bali maju secara perekonomian, maka generasi muda memiliki cara sendiri untuk menentukan perilaku yang potensial menunjukkan bahwa perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai suku Lampung. Sehubungan tersebut maka relasi sosial yang disosiatif ini terjadi. Menurut Hafid (2013), relasi sosial yang diasosiatif menunjukkan bahwa relasi sosial itu saling bertentangan. Itulah sebabnya relasi sosial ini sering kali tidak disukai oleh masyarakat karena satu sama lain saling bertentangan dengan apa yang diharapkan.

Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Suku Lampung dan Suku Bali tersebut menurut Nurul (2012) relasi sosial yang positif karena warga yang mengikuti transmigrasi mampu menciptakan suasana yang harmonis. Demikian juga yang dikemukakan oleh Hadif (2013) bahwa relasi sosial di antara dua etnis yang berbeda melahirkan kerja sama dan akomodasi. Relasi sosial seperti ini adalah relasi sosial yang asosiatif.

Senada dengan hal di atas, Hadif (2013) mengatakan bahwa relasi sosial di masyarakat yang multikultur adalah relasi yang dilahirkan dari interaksi kelompok dengan kelompok lain yang menghasilkan kerja sama baik di bidang sosial ekonomi dan politik. Dengan demikian, meskipun masyarakat berbeda baik dari suku agama ras dan antargolongan, namun masyarakat yang mampu menciptakan kerja sama sehingga kehidupan harmonis.



Relasi sosial asositatif tersebut menjadi suatu hal yang perlu dilakukan, mengingat meskipun masyarakat aktivitas yang berbeda-beda, namun di dalam aktivitas tersebut saling membutuhkan satu dengan lain. Hal ini terungkap dalam penelitian bahwa masyarakat yang multikultur terdapat aktivitas yang memerlukan kerja sama seperti kerja sama ekonomi antara buruh dan pengusaha. Kedua pihak tersebut membutuhkan kerja sama karena satu sama lain saling membutuhkan.

B. Relasi Sosial Disosiatif Suku Bali dan Suku Lampung

Relasi sosial yang disosiatif juga dijumpai pada Suku Lampung dan Suku Bali. Kedua suku ini mengalami pertentangan yang hebat bahkan telah mengarah kepada konflik sosial di antara kedua suku. Konflik sosial ini menurut Benjamin (2017), bukan pertama kali karena jauh sebelumnya kedua suku ini sudah bertentangan akibat pergaulan anak muda Suku Bali yang dianggap tidak sopan oleh Suku Lampung. Namun, saat itu Suku Lampung tidak mengambil pertentangan itu sebuah persoalan sehingga tidak terjadi konflik sosial.

Namun, menurut Hadif (2016) pertentangan itu terus-menerus dibiarkan tanpa ada solusi yang tepat maka potensial akan terjadi konflik. Tampaknya pendapat Hadif itu sama hal pada kasus pergaulan anak muda Bali yang kemudian menyebabkan konflik besar-besaran di antara kedua suku tersebut. Anak muda Bali mengganggu anak putri Lampung yang berujung pada kecelakaan. Namun, kasus tersebut tidak mendapat jalan penyelesaian karena anak muda Bali tidak mau berdamai. Bahkan para tokoh adat Lampung dan suku Lampung dianggap telah turut memperpanjang kasus tersebut sehingga tidak ada penyelesaian di antara kedua suku tersebut.

Menurut Dahrendorf dalam Ritzer dan Goodman (2012), konflik sosial akan terjadi apabila kedua yang sedang bertikai ada kecemburuan sosial karena suku pendatang lebih sejahtera dibanding



suku pribumi. Namun tampaknya konflik yang ada di Lampung Selatan tidak demikian, suku Lampung sebagai suku pribumi yang tingkat kesejahteraannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Suku Bali, namun Suku Lampung tidak cemburu karena kesejahteraan Suku Bali. Bagi Suku Lampung, Suku Bali wajar kaya karena memang pekerja keras sebagai petani yang dianggap oleh Suku Lampung pekerjaan yang kasar. Karena itu, Suku Lampung tidak cemburu apabila mereka telah menghasilkan karena itu dianggap kerja keras mereka.

Namun, penyebab konflik yang terjadi di kedua suku tersebut adalah karena pergaulan anak muda yang tidak menghargai etika pergaulan secara umum. Anak muda Suku Bali, menganggap dia yang paling berkuasa dan dia lah yang paling kaya maka semauanya bertindak mengganggu anak putri Suku Lampung. Bagi suku Lampung anak perempuan merupakan harga diri. Karena harga diri maka siapa pun yang akan mengganggu maka dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan harga diri tersebut. Inilah yang dalam falsafah Lampungnya adalah *fiil*. Itulah sebabnya setiap Suku Lampung memiliki *fiil* (harga diri) yang tinggi sehingga tidak mau direndahkan atau dilecehkan. Melecehkan satu orang Lampung sama halnya melecehkan seluruh orang Lampung.

Temuan ini sama dengan penelitian Humaedi (2014), mengatakan bahwa penyebab konflik di Lampung karena kegagalan akulturasi budaya hal ini disebabkan karena sejak awal Bali dibuatkan pemukiman oleh pemerintah sehingga tercipta primordial yang mengakibatkan arogansi warga Bali. Sedangkan pemukiman Lampung dibentuk dengan sendirinya. Dengan demikian, nilai yang dijunjung tinggi oleh Lampung tidak dipahami oleh Bali. Kebiasaan Bali memelihara anjing dan babi yang kedua binatang tersebut merupakan binatang najis bagi Lampung yang beragama Islam menjadi pemicu ada membuat kedua suku tersebut berjarak. Terlebih perilaku pemuda Bali yang tidak sopan memperlakukan perempuan Lampung yang telah menyinggung *fiil*



(harga diri orang Lampung) yang kemudian menjadi pemicu konflik yang selama ini terpendam.

Sehubungan dengan harga diri tersebut, maka tidak heran manakala terjadi konflik di Lampung, semua suku Lampung yang ada di Lampung tanpa terkecuali di Lampung Selatan bersatu menjadi bagian dalam konflik. Memobilisasi massa seperti ini dilakukan yang apabila mengacu pada Weber (1968) adalah memperkuat solidaritas organik dan juga solidaritas organik.

Namun, menurut Hadif (2016); Hendri, dkk. (2013) tidak selamanya masyarakat yang multikultur mengalami konflik akan terus berkonflik. Setidaknya masing-masing anggota yang berkonflik tidak menghendaki adanya konflik yang berkepanjangan. Menyadari relasi yang sudah lama terjalin akan jauh lebih baik apabila keduanya melakukan relasi damai. Atas dasar kesadaran itu, maka Suku Lampung dan Suku Bali melalui mediasi oleh berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh adat dari kedua suku dan juga warga sendiri, maka proses untuk kembali damai dilakukan. Hidup berdampingan secara harmonis menjadi tujuan utama dari kedua suku tersebut.

Menurut Yuasidha (2013) harmonisasi dalam masyarakat multikultur terjadi apabila keduanya melaksanakan toleransi. Suku Lampung dan Bali saling menghargai dalam praktik-praktik keagamaan, seperti pada saat Suku Bali melakukan upacara ogoh-ogoh, Suku Lampung menghadiri upacara tersebut. Demikian sebaliknya, Suku Lampung melaksanakan praktik keagamaan berupaya yasinan, Suku Bali menghadiri undangan tersebut. Kehadiran kedua suku tersebut menunjukkan bahwa keduanya saling toleransi terhadap praktik-praktik keagamaan, sekalipun setelah konflik selesai.

Relasi sosial kehidupan masyarakat multikultur setelah selesai terjadi konflik menurut Klinken (2007) terhadap hal-hal yang positif. Demikian juga halnya dengan kasus relasi sosial Suku Bali dan Suku Lampung, setelah selesai konflik kedua suku tersebut tidak saja saling menghargai di antara suku, tetapi juga solidaritas di sesama mereka



saling menguat. Suku Bali mulai memanfaatkan banjar sebagai tempat pertemuan mereka. Di banjar itu juga media Suku Bali untuk saling mengontrol anggotanya dan saling mengingatkan bahkan memperkuat etika pergaulan antarsesama manusia.

Demikian sebaliknya, Suku Lampung mulai tumbuh lembaga lokal seperti lembaga *rembuk pekon* yang anggotanya terdiri dari seluruh suku yang bermukim di Lampung. *Rembuk pekon* ini dijadikan media untuk menampung aspirasi warga terkait tentang konflik. Dibentuknya *rembuk pekon* ini bertujuan untuk media komunikasi agar tidak terjadi konflik yang akan merugikan masyarakat.

Setelah terjadi konflik, maka secara tidak langsung daerah itu menjadi daerah yang rawan terjadi konflik berikutnya karena penyelesaiannya tidak sampai ke akar permasalahan konflik (Rummel, 1997). Namun, tampaknya bagi dua suku yang berkonflik yakni Suku Lampung dan Suku Bali konflik yang terjadi pada tahun 2012 yang lalu menjadi konflik yang terakhir sepanjang sejarah mereka, karena mereka menyadari bahwa mereka sebelumnya adalah memiliki relasi yang baik dan akan dilanjutkan dengan relasi yang lebih baik lagi, tidak saja dengan toleransi tetapi juga dengan kerja sama. Saat ini kerja sama mereka memang belum tampak namun mereka memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja sama dalam berbagai bidang seperti membentuk unit usaha ekonomi bersama.

Selaku daerah yang dianggap rawan konflik, maka daerah ini juga mendapat perhatian penuh dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan masyarakat luas. Dari masyarakat bantuan mereka terima berupa sembako. Selain itu Suku Lampung juga mendapat bantuan bedah rumah karena beberapa rumah Suku Lampung dianggap kurang layak huni karena kurang higienis. Bantuan-bantuan tersebut diterima warga setelah terjadi konflik.

Selain itu, di daerah Desa Agom di mana tempat tinggalnya Suku Lampung dibangun jalan tol, sehingga berimbas pada kesejahteraan warga. Suku Lampung membuka unit usaha lainnya seiring adanya



jalan tol di perkampungan mereka. Unit-unit usaha tersebut seperti warung, bengkel dan toko memperoleh hasil yang signifikan untuk kesejahteraan Suku Lampung.

Munculnya lembaga lokal, memanfaatkan banjar untuk komunikasi antara warga, memperoleh bantuan, memperoleh perhatian khusus dari berbagai pihak, merupakan dampak positif dari terjadinya konflik. Dengan demikian, menurut Hafid (2016), menyatakan relasi sosial warga yang telah bertikai memiliki dampak positif. Dampak positif itu bukan semata-mata datang dari pihak luar namun justru datang dari dalam diri masing-masing. Dalam temuan ini menunjukkan bahwa suku Bali yang dianggap oleh Suku Lampung memiliki karakter yang keras dan telah beberapa kali membuat tindakan yang bertentangan dengan nilai Suku Lampung, namun Suku Bali tetap dibiarkan bermukim kembali di Desa Balinuraga.

Kasus konflik antaretnis Lampung dan Bali tampaknya tidak berlangsung lama, karena setelah konflik kedua suku tersebut dapat hidup berdampingan. Hal ini serupa dengan kasus konflik di Sambas pada tahun 1999 yang berdampak pada pengusiran Suku Madura, namun setelah konflik kedua suku hidup berdampingan secara harmonis (Henry, dkk: 2013). Demikian juga penelitian Huda dan Wibowo (2013), yang menyatakan interaksi sosial Suku Samin dengan masyarakat sekitar di Desa Margomulyo bersifat relasi asosiatif dan disosiatif. Apabila ada relasi sosial yang disosiatif maka warga dapat meredamnya sehingga relasi sosial dapat harmonis kembali.

Mengacu pada Durkheim dalam Ritzer dan Goodman (2012), bahwa solidaritas seperti yang terjadi pada Suku Lampung dan Suku Bali telah menguat setelah terjadi konflik, baik solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Menguatnya kedua solidaritas ini karena satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks ini Abdullah (2008) mengatakan bahwa dalam keadaan bencana seperti konflik misalnya, solidaritas sedang diuji, menguat atau tidaknya sangat bergantung masyarakat itu sendiri, karena dalam kondisi bencana semua orang



akan berupaya menyelamatkan diri masing-masing. Tampaknya statemen itu diteliti oleh Napsiah, dkk., (2016) dengan melihat solidaritas masyarakat bencana Merapi. Solidaritas masyarakat Merapi justru menguat pada saat terjadi bencana karena semua pihak berupaya untuk membantu masyarakat Merapi yang menjadi korban letusan yang besar pada tahun 2010. Dengan demikian, pada saat terjadi bencana solidaritas tetap menguat, karena solidaritas itu telah dibangun sejak lama. Jadi ada atau tidak ada bencana solidaritas tetap melekat di dalam masyarakat.

Menguatnya solidaritas pada saat bencana juga terjadi pada masyarakat Bantul yang memberikan bantuan berupa tenaga dengan cara warga Bantul membantu membersihkan material Merapi pada saat penduduk Merapi terkena dampak material dari letusan Merapi 2010. Penduduk Bantul memberikan bantuan karena sebelumnya penduduk Merapi memberikan bantuan berupa tenaga kepada masyarakat Bantul yang menjadi korban bencana gempa bumi tahun 2006 yang lalu (Napsiah, dkk 2016).

Selain itu juga setelah terjadi bencana seperti konflik misalnya, tumbuh masyarakat yang dengan cepat melinting balik atau memiliki daya tahan terhadap bencana. Kasus konflik suku Bali dan suku Lampung menunjukkan bahwa setelah terjadi konflik aktivitas ekonomi warga bangkit dengan cepat karena mereka memiliki aktivitas ekonomi yang jauh lebih mapan sejak dibangunnya jalan tol yang melewati Desa Agom. Temuan ini juga sama dengan masyarakat Merapi setelah bencana mereka memiliki aktivitas baru yaitu ekonomi wisata yang penghasilannya cukup signifikan bagi masyarakat korban bencana (Napsiah, dkk, 2017).

Tidak berbeda jauh, Indra, dkk., (2011) mengatakan bahwa pascabencana seperti konflik, maka muncul usaha-usaha baru warga. Di Aceh dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sektor perbengkelan menjadi sektor andalan untuk dijadikan sumber penghidupan masyarakat. Demikian juga halnya penduduk Merapi, setelah bencana



selesai aktivitas ekonomi warga yang semula sektor pertanian setelah bencana maka aktivitas ekonomi warga lebih dominan sektor pariwisata (Napsiah, dkk, 2017).

Laurier (1993) mengatakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi yang dialami oleh Suku Bali dan Suku Lampung seperti menguatnya solidaritas, tumbuhnya aktivitas ekonomi baru dan juga munculnya lembaga-lembaga sosial baru menunjukkan bahwa perubahan yang direncanakan sehingga masyarakat dapat mengikuti arah perubahan itu. Meskipun kedua suku tersebut mengalami perubahan yang cepat karena terjadi konflik, maka melalui jalan berdamai kedua suku tersebut dapat menata kembali relasi sosial mereka dari yang asosiatif kemudian disosiatif kembali ke asosiatif kembali. Sehubungan dengan itu, relasi kedua suku tersebut mengalami dinamika yang akhirnya kembali pada kondisi awal, yaitu relasi asosiatif.

C. Dari Relasi Sosial Suku Lampung dan Suku Bali: Asosiatif, Relasi Disosiatif Menuju Relasi Asosiatif

Relasi sosial selalu mengalami dinamika, tidak saja hubungan yang asosiatif yang kedua belah pihak tersebut melakukan interaksi yang tidak akan menimbulkan kerugian sosial, tetapi relasi yang disosiatif yang kedua belah pihak berkonflik karena masing-masing pihak memiliki berbagai kepentingan.

Interaksi yang disosiatif tampaknya tidak lama karena kedua belah pihak berupaya melakukan perdamaian, sehingga secara perlahan relasi sosial tersebut akan menuju interaksi asosiatif kembali. Sekalipun interaksi yang disosiatif terjadi namun secara perlahan akibat adanya perubahan sosial maka secara perlahan interaksi yang disosiatif tersebut menuju interaksi disosiatif.

Interaksi yang asosiatif menjadi interaksi disosiatif menuju interaksi asosiatif kembali menurut Marx (dalam Ritzer dan Goodman,



2012) adalah tesa anti tesa dan sintesa. Karena itu, maka interaksi adalah ciri masyarakat yang fungsional yang apabila mengalami perubahan menuju ke hal yang disosiatif dan akhirnya menuju interaksi yang asosiatif kembali.



BAB 8

KESIMPULAN

Relasi sosial pada masyarakat multikultur selalu dihadapkan dengan persoalan asosiatif dan disosiatif karena masyarakat multikultur adalah tempat bertemunya perbedaan suku-suku yang masing-masing membawa adat istiadat, agama dan nilai yang diyakini masing-masing. Apabila perbedaan itu dikelola dengan baik maka merupakan modal bagi suatu daerah karena dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Namun, sebaliknya berbagai perbedaan di dalam masyarakat multikultur tidak dikelola dengan baik, maka terjadi relasi sosial disosiatif.

Dalam praktiknya, relasi sosial di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal mengalami dinamika. Relasi yang terbangun di antara kedua suku tersebut, semula relasi sosial berjalan dengan harmonis karena masing-masing suku saling menghargai perbedaan maka kedua suku tersebut hidup berdampingan secara turun menurun.

Namun, tampaknya keterlekatan relasi tersebut tidak selamanya dipertahankan, karena seiring dengan pergantian generasi nilai yang semula dipegang teguh selama ini, telah mengalami pergeseran seiring dengan perubahan era. Hal ini disebabkan karena kemajuan

ekonomi yang signifikan dan kemudahan teknologi dengan mudah diakses oleh generasi muda. Akibatnya nilai dan norma yang ada di masyarakat tampaknya tidak disosialisasikan sehingga nilai dan norma tersebut tidak dipahami oleh generasi muda. Hal ini disebabkan karena sejak awal pola pemukiman warga pendatang dibuat oleh pemerintah terpisah dengan pemukiman warga lokal. Selain itu tidak ada ruang-ruang dialog yang mempertemukan kedua suku tersebut, sehingga wajar apabila ada keterlambatan dalam memahami budaya dari kedua suku baik pendatang maupun warga lokal.

Benturan nilai tersebut yang kemudian memicu terjadinya konflik antarwarga pendatang dengan warga lokal, sehingga berbagai tindakan lokal dilakukan untuk mengungkapkan protes terhadap ketidakmampuan warga lokal beradaptasi dengan warga lokal. Akibat dari relasi konflik tersebut menimbulkan tindakan-tindakan anarkis yang telah menimbulkan berbagai kerugian baik kerugian material dan nonmaterial, bahkan kematian.

Namun, relasi sosial yang konflik tidak berdampak pada pemutusan relasi di antara kedua belah pihak yang berkonflik karena kearifan lokal berupa nilai dan agama menjadi landasan untuk berdamai. Karena itu, solidaritas baik solidaritas mekanik, solidaritas organik semakin menguat, karena warga disatukan dengan tujuan yang sama yaitu menjalin perdamaian. Selain itu, terbangun budaya dialog lokal yang berfungsi untuk menampung aspirasi seluruh warga, sehingga konflik antarwarga dapat diminimalisir. Demikian juga halnya dengan beragamanya aktivitas ekonomi yang semula hanya ekonomi pertanian, setelah konflik tumbuh sektor ekonomi alternatif yang mendorong tingkat kesejahteraan kehidupan warga. Bahkan persaudaraan semakin terjalin karena keduanya bersepakat untuk menjadi saudara yang dilakukan melalui adat.

Sehubungan dengan itu, proses relasi sosial yang asosiatif, disosiatif, dan kembali ke relasi asosiatif menjadi temuan dalam



penelitian ini yang sekaligus mengembangkan teori relasi sosial yang menyatakan bahwa relasi sosial dalam masyarakat adalah relasi sosial yang asosiatif dan disosiatif tanpa memperhitungkan bahwa relasi sosial tersebut jauh lebih baik karena pascakonflik kedua suku berkomitmen untuk berdamai dengan diikuti juga berbagai perubahan baik lingkungan fisik maupun sosial.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. 2008. *Konstruksi dan Reproduksi Sosial atas Bencana Alam*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Akhyar, Yusuf Lubis. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer Kontemporer: dari Teori Kritis, Cultural Studies, Eminism, Postcolonial Hingga Multikultural*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bates, Robert H, David L.Epstein, Jack A Goldstone, 2003. *Potilical Instability Task Force Report: Phase IV FIndings*.
- Benjamin, 2017. *Konflik Antaretnis di Lampung Selatan*. Disertasi Bandung: UNPAD.
- Besancon, Marie L. 2005. *Relative Resources: Inequality in Ethnic Wars, Revolutions and Genpcides*. *Journal of Peace Research* 42: 393-415.
- Blackard, Kirk & Gibson,James W..2003. *Capitalizing on Conflict: Strategies and Practices for Turning Conflict to Synergy in Organizations*. Mumbai: Jaico Publishing House.
- Bumulo, Sahrain. 2013. *Keserasian Sosial Hubungan Antaretnik pada Masyarakat Banurojo Kabupaten Pohuwoto*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Gorontalo.

- Dahrendorf, Ralf. 1993. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri; Sebuah Analisa- Kritik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Davies, James C. 1962. Toward a Theory of Revolutio. *American Sociological Review* 27: 5-19.
- Esteban, Joan, Laura Mayoral and Debraj Ray. 2012. "Ethnicity and Conflict: An Empirical Study." *American Economic Review*, 102(4):1310-42.
- Fox, Johathan. 2002. Etnic Minorities and the Clas of Civizations: A Qualitative Analysis of Huntington's Thesis. *British Journal of Political Science* 32: 415-434.
- . 2004a. Is Ethnoreligious Conflict a Contagious Disease? *Studies in Conflict and Terrorism* 27: 89-106.
- Gibson, James L., Ivancevich ,John M. & Donnelly, James H. 1994. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Proses* (terj. Djoebran W.). Jakarta: Erlangga.
- Hafid, Abdul. 2016. Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Regency South Sulawesi. *Al-Qalam* Vol 22 No.1.
- Hendri, Eka, dkk. 2013. "Integrasi Sosial dalam Masyarakat Multietnik". *Jurnal Walisongo* Volume 21 (1): 192-218.
- Huberman, M.A. dan M.M. Miles. 1984. "Data Management and Analysis Methods" dalam Denzin, K.N dan Y.S. Loncoln (ed). *Handbook Of Qualitative Research*". London: Sage Publication.
- Huda, Khoirul dan Wibowo Anjar Mukti, 2013. "Interaksi Sosial Suku Samin dengan Masyarakat Sekitar: Studi Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo. *Jurnal Prodi Sejarah*. Vol 3 (1): 127-148.
- Humaedi, M. Alie, 2014. Kegagalan Akulturasi Budaya dan Konflik Agama di Lampung. *Jurnal "Analisa"* Volume 21 Nomor 02 Desember 2014 halaman 149-162.

- I made Titib. 2004. "Agama dan Budaya Perdamaian Dalam Masyarakat Hindu" (ed) Muhaimin AG. *Damai di Dunia Damai untuk Semua. Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Indra, Agussabti, S.Bahri, M. Zainuddin, S, Umar, E, Putra. 2011. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Survival Pascabencana". *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Kebencanaan TDMRC-Unsyiah, Banda Aceh*.
- Kurniawan, dedi dan Syani, Abdul. 2015. Faktor Penyebab Dampak Dan Strategi Penyelesaian Antarwarga di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Sosiologi*, Vol.15 no.1:1-12.
- Kymlica, Will. 2002. *Kewargan Multikultural*. Terjemahan Edlina Hafmini Eddin. Jakarta: LP3ES.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (terj. Alimandan S.U.). Cet.2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lewellen, Ted.C. 2003. *Political Anthropology: An Introduction* (edisi ketiga) London: Praeger Publisher.
- Mawardi R. Harirama. *Falsafat Adat/Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Yayasan Pesirah Marga, 2004.
- Mustofa, Imam dan Liberti. 2018. Peran Organisasi Masyarakat Dalam Membangun Harmoni Pascakonflik Antara Masyarakat Pribumi Dengan Masyarakat Pendetang di Lampung Tengah. *PENAMAS* vol.31(1): 205-226.
- Napsiah, Budhi Gunawan, Oekan S. Abdoellah, M. Sulaeman. 2016. Value Rationality of People Living on the Slope of Merapi in Yogyakarta. *Analisa Journal of Social Science and Religion*. Vol 1 (1): 105-120.
- . 2017. Economic Rationality of Residents Living in the Area Prone to Merapi Volcanic Disaster. 2017. *Komunitas: International of Indonesia Society and Culture* Vol 9 (2):203-215.



- Nasikun, 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasution, Rosramadhana, 2016. *Ketertindasan Perempuan dan Tradisi Kawin Anom. Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dan Perspektif Paskolonial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nurul, Ramadhani Yuasidha. 2013. Kohesivitas Penduduk Asli dan Pendetang dalam Multikulturalisme (Studi Deskriptif Mengenai Kedekatan Sosial antar Penduduk Asli dan Penduduk di Kelurahan Sidotopo Wetan). Surabaya: Universitas Airlangga.
- Parakasita, Niti Dhika dan Sugeng Harianto, 2017. Masyarakat Multikultural Perkotaan (Studi Relasi Antaretnis dalam Kegiatan Ekonomi di Wilayah Perak Surabaya). *Paradigma*. Vol.05 (5): 1-9.
- Patton, M.Q. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Klinken, Van Gerry. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Terjemahan Bernard Hidayat. Jakarta: Yayasan Obor.
- Pruitt, Dean G. & Rubin, Jeffrey Z. 2011. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, Tulus Ribut, Jayusman, dan Sidik (2016). Konflik Etnis Tionghoa dan Jawa di Pekalongan. 2016. *Journal of Indonesian History* 5 (1):1-8.
- Ramdhani, Suciayadi. 2018. Konstruksi Nilai Multikulturalisme pada Masyarakat Haugergeulis Kabupaten Indramayu. *Patanjala* Vol10 (1): 1-9.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rummel, Rudolph J. 1997. Is Collective Violence Correlated with Social Pluralism? *Journal of Peace Research* 34: 163-175.

- Russett, Bruce M., John R. O Neal and Cox. 2000. Clas of Civilizations or Realism and Liberlism Deja vu? Some Evidence. *Journal of Peace Research* 37: 583-608.
- Rustanto, Bambang. 2015. Masyarakat Multikultural di Indonesia. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Saifuddin, Ahmad.1986. *Konflik dan Integrasi*. Jakarta: Rajawali.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi. Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Sinaga, Margaretha Risma. 2014. Revitalisasi Tradisi: Strategi Mengubah Stigma. Kajian PIIL Pesenggiri dalam Budaya Lampung. Disertasi UI.
- Sulastomo. 2004. "Agama dan Budaya Perdamaian dalam Masyarakat Islam" dalam *Damai di Dunia Damai untuk Semua*. (Editor: Muhaimin AG). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Sulistyo Irianto and Risma Margetha. 2011. "Piil Pesenggiri: Modal Budaya dan Strategi Indentitas *Ulun Lampung*", *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 15, No. 2, 2011. pp. 140-150.
- Hidayati, D. (2016). Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Waning Value of Local Wisdom in the Management of Water Resources). *Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 11 No. 1 Juni 2016 | 39-48, 11(1), 39-48*. <https://doi.org/10.14203/jki.v11i1.36>
- Suardi, S. (2017). Masyarakat Multikulturalisme. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, (December), 1-14. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29013.32484>
- Suparlan, Parsudi. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Simposium Internasional Bali ke-3 Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002.



Ulaan, Klaudia, Herani, Ika dan Rahmawati, Intan. 2016. Prasangka Mahasiswa Papua pada Etnik Jawa d Kota Magelang. *Jurnal Mediapsi*. Vol.2 no 1. 11-18.

Utami, Anisa 2013. Resolusi Konflik Antar Etnis Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus: Konflik Suku Bali Desa Balinuraga Dan Suku Lampung Desa Agom Kabupaten Lampung Selatan). <https://media.neliti.com/media/publications/105012-ID-resolusi-konflik-antar-etnis-kabupaten-l.pdf> diakses pada tanggal 2 februari 2019.

Weber, Max. 1968. *Economy and Society*. (ed) Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press.

Sumber dari Internet

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Menara Siger, Simbol Kebanggaan Lampung”, <https://travel.kompas.com/read/2014/03/03/1756221/Menara.Siger.Simbol.Kebanggaan.Lampung>.

<https://bajutradisionals.com/baju-adat-lampung/baju-adat-lampung-saibatin/>

<http://batinbudayapoerba.blogspot.com/2013/11/rumah-adat-lampung-lambang-kesatuan.html>

<http://pesawarantanjungputuslampung.blogspot.com/2016/01/menara-siger.html>

<http://www.lampost.co/berita-ribuan-umat-hindu-balinuraga-ritual-melasti>

<http://www.lintasberita.web.id/kumpulan-foto-perang-suku-lampung-vs-bali/>

<https://www.kompasiana.com/andiansyori/55198d47a333113d19b65960/kerusuhan-lampung-selatan-akhirnya-warga-asal-bali-diangkat-saudara>



<https://www.cendananews.com/2017/01/melihat-dari-dekat-aktivitas-pelelangan-ikan-di-tpi-bom-kalianda-lampung.htm>

Sumber lain

Al-Qur'an dan Terjemahan: Penerbit Sahifa: Jakarta.

BPS 2015.

Arsif Desa Balinuraga dan Arsif Desa Agom, 2012.



[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BIODATA PENULIS



Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si. lahir di Lampung Utara, 18 Oktober 1972. Penulis adalah Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Meraih gelar Sarjana Sosiologi pada tahun 1995 dari Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2000 gelar Magister Sosiologi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Gelar Doktor Sosiologi diraih pada tahun 2015 dari Universitas Padjajaran Bandung dengan Disertasi yang berjudul Rasionalitas Warga yang Bermukim di Daerah Rawan Bencana Merapi di Yogyakarta memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Ilmiah (HKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2015.

Dosen yang aktif di bidang sosial kemasyarakatan ini pernah dinobatkan menjadi Dosen Teladan Mutu oleh UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017. Berbagai karya ilmiah telah dipublikasikan di jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi yang dapat diakses melalui google scholar. Untuk korespondensi dapat menghubungi email napsiah_2008@yahoo.com



Darmiyati, S.Pd., M.Pd. lahir di Lampung Utara, 5 Desember 1977, adalah anak ketujuh dari sembilan bersaudara, putri dari pasangan Bapak H. Ibrahim Sutan Lela (Alm) dan Ibu Hj. Umyani (Almh).

Pendidikan dasar sampai menengah ia selesaikan di Lampung Utara. Tahun 2001 menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Program Magister Pendidikan ditempuh di universitas Lampung pada tahun 2017 dengan konsentrasi Program Studi Pendidikan Ilmu Sosial. Saat ini penulis tercatat sebagai guru di SMA Negeri 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

Penulis aktif dalam kegiatan organisasi profesi PGRI dan menjadi pengurus inti tingkat Kabupaten. Beberapa buku telah diterbitkan antara lain *Bagelen dari Masa ke Masa* (2016), *Etnisitas Kota Bandar Lampung* (2016), *Upgrade Indonesia* (2017), *Aku Menjadi Kita* (2018), *Ketika Humas Bicara* (2018). Menulis di Jurnal Studi Sosial dan menjadi pembicara pada seminar nasional, menjadi Instruktur Guru Pembelajar serta meraih predikat Guru Berprestasi tingkat Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2018 dan aktif mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kementerian pendidikan.

Untuk berkomunikasi, penulis dapat dihubungi di 085269005854 (Whatsapp), atau darmiyatisutan@gmail.com.



Prof. Ustadi, Ph.D. adalah salah satu guru besar di Fakultas Pertanian Jurusan Perikanan Universitas Gadjah Mada. Lahir di Jakarta, 27 November 1962. Pendidikan yang ditempuh S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Sedangkan S3 dengan gelar Ph.D diraih dari Gangneung Wonju National University, Korea. Dosen yang aktif dalam kegiatan sosial agama dan kemasyarakatan ini telah mempublikasikan karya ilmiah dalam bentuk buku dan jurnal baik jurnal Internasional maupun jurnal nasional yang dapat diakses di google schoolarnya. Untuk korespondensi dapat menghubungi email ustadi@ugm.ac.id



Masdjuri, M.Si., lahir di Sumenap, 20 Maret 1959. Menempuh Sarjana di Universitas Gadjah Mada. Gelar Magister di Jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di UIN Sunan Kalijaga. Pengajar Bahasa Arab ini memiliki minat kajian tentang bunuh diri. Tulisan tentang bunuh diri di Gunung Kidul adalah sumbangan pemikiran beliau yang telah dipublikasikan dalam bagian buku yang berjudul *Pemetaan Pemikiran Dosen Fishum* pada tahun 2017. Dunia dosen telah mengantarkannya untuk melaksanakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.



